

MEMBANGUN AGEN PASTORAL YANG MEMPUNYAI SIKAP DAN MENTALITAS KEBERPIHAKAN KEPADA KAUM MISKIN

[Sebuah Studi Teologis Praktis]

Valentinus Vitalis Jebagu

Abstract: *Almost all bishops' conferences, catechetical congresses and religious congregations have made "preferential option for the poor" one of the priorities of their resolutions. This option includes the issues of justice, liberation, peace and ecology. The question remains, however, as to how deeply this option really affected the life and spirituality of the committed Christian and of the ecclesial group like pastoral agents? The implementation of this option, according to Mr. Valens Jebagu, will be one of the acid tests of whether the Christian faith will be relevant and whether traditional churches and their institutions will survive. Option for the poor is for the Church not only realized as a political strategy but more than that an existential choice. A. Schweitzer states it this way: "As for humankind today the realization of the Kingdom of God here on earth by optioning the poor, has become a matter of survival or extinction. Option for the poor is the most powerful symbol of hope in the religious and social history of humankind."*

Keberpihakan kepada kaum miskin merupakan dimensi yang lebih dipahami sebagai sikap dan mentalitas yang meresapi segala bidang karya agen pastoral. Bukan supaya agen pastoral memberantas kemiskinan dengan mati-matian mengupayakan kesejahteraan bagi kaum miskin. Agen pastoral tidak memosisikan diri untuk melakukan sebuah upaya yang efektif untuk pemberantasan kemiskinan supaya kaum miskin mengalami kehidupan yang lebih baik dan sejahtera, melainkan sebagai kebajikan kemanusiaan dan ekspresi imannya yang diejawantahkan melalui sikap dan mentalitas pribadi yang mewarnai seluruh karya pewartaan, liturgi, pelayanan, persekutuan dan kesaksian yang tetap bersifat pastoral. Bukan dalam artian agen pastoral bekerja dalam bidang pemberantasan kemiskinan. Kalau pun agen pastoral ikut berperan dalam kegiatan karitatif, hanya sebatas untuk meringankan beban penderitaan kaum miskin, bukan untuk menyelesaikan persoalan kemiskinan yang dialami kaum miskin. Keberpihakan kepada kaum miskin

bukan bidang yang merupakan tugas pokok atau pekerjaan utama agen pastoral sehari-hari. Agen pastoral tidak dipanggil atau ditugaskan secara khusus untuk menjalankan pekerjaan semacam itu. Sebagai agen pastoral dituntut meneladani Yesus yang mempunyai pikiran, mempunyai hati, mempunyai sikap dan mentalitas memperhatikan, mencintai, mengasihi dan mengutamakan kaum miskin dalam berbagai aspek pewartaan, liturgi, pelayanan, persekutuan dan kesaksian di tengah umat. Kalau agen pastoral mengambil sikap berpihak kepada kaum miskin, tidak pernah berarti bahwa membuang, membenci, memusuhi, menentang dan menyisihkan siapa pun juga, akan tetapi dalam perbuatan dan prakteknya perlu ada prioritas, siapa yang didahulukan dan siapa yang tidak didahulukan. Yang didahulukan ialah kaum miskin dan barulah menyusul orang kaya. Kaum miskin didahulukan karena mereka tidak dapat menolong diri mereka sendiri, sedangkan orang kaya tidak didahulukan karena mereka memiliki jaringan keuangan dan segala sesuatunya serba ada.

1. PENDAHULUAN

Tema tulisan ini diracik dengan bertolak dari keprihatinan mengenai kaum miskin dan juga untuk sejenak mengingatkan kita pada jati diri dan eksistensi Gereja sebagai Gereja kaum miskin. Barangkali tema ini akan sangat membosankan, terlebih bagi pihak yang selama ini berkecimpung sebagai penggiat kaum miskin. Dan boleh jadi yang paling membosankan lagi ialah kaum miskin itu sendiri. Lantaran sudah sampai pada tingkat sangat jenuh mendengar perbincangan seperti itu di tengah masyarakat dan di dalam Gereja, yang sudah terlampau sering, namun hasilnya mungkin saja belum seberapa dirasakannya. Apalagi kalau perbincangan itu terkesan hanya karena telah menjadi suatu tradisi yang harus dikawal atau diamankan oleh semua pihak sebagai agenda tahunan. Dan di dalam agenda semacam itu juga, kaum miskin yang menjadi sorotan untuk diperbincangkan justru tidak diajak untuk dilibatkan.

Lalu bagaimana mau memikirkan nasib orang miskin, kalau orang miskin sendiri kurang dihargai? Apakah akan lebih efektif dalam merumuskan dan berbuat sesuatu yang sungguh dibutuhkan oleh kaum miskin sendiri dengan proses seperti itu? Bukankah justru dengan itu hanya mereka-reka atau meraba-raba persoalan kaum miskin? Atau hanya sekadar keliling-keliling dengan soal yang itu-itu saja, kurang menyentuh konteks secara menggigit?

Mungkin juga apa yang akan dikerjakan kemudian hanya sebatas kulit luar persoalan, tak pernah menyentuh sisi terdalam dengan segudang tumpukan soal yang dialami kaum miskin.

Dalam menyampaikan pikiran ini, saya tidak sedang mengatasnamakan kaum miskin atau sekurang-kurangnya mewakili isi hati orang miskin yang notabene adalah saudara dan keluarga saya juga, untuk melukiskan kira-kira seperti apa dan bagaimana perasaan, keinginan, dan harapan terpendam lama dalam hati kecil mereka kepada agen pastoral, melainkan untuk memperlihatkan seperti apa dan bagaimana seharusnya sikap yang mesti ada dan dimiliki oleh agen pastoral kepada kaum miskin sebagai ekspresi imannya.

Dan ketika ingin akan menjelaskan keberpihakan agen pastoral kepada kaum miskin, maka harus diperhadapkan dengan sebagian kalangan, baik kalangan intern Gereja sendiri maupun dari luar lingkup Gereja, yang beranggapan bahwa keberpihakan agen pastoral kepada kaum miskin masih setengah hati, selektif dan serba terlambat dalam bersikap, mungkin karena terlalu berhati-hati dan memiliki banyak pertimbangan. Dugaan semacam ini terdengar sepintas ke telinga memang agak keterlaluan, kurang proporsional, dan menghakimi. Kiranya bukan karena dilatari oleh sentimen kebencian, melainkan oleh cinta tulus kepada Gereja Kristus. Jika benar seperti itu, maka diberi apresiasi. Malahan merupakan hal yang sangat bagus, karena telah dan akan terus mengingatkan agen pastoral untuk konsisten meniru Sang Guru memihak kaum miskin.

Tanpa mengurangi rasa hormat dan niat baik di balik tanggapan sebagian kalangan, saya sebaliknya boleh berandai bahwa penilaian yang demikian menyudutkan itu, muncul karena dilatari juga oleh arti keberpihakan yang kurang dimengerti dengan benar atau sekurang-kurangnya karena memang tidak mengetahui apa persisnya tugas Gereja melalui agen pastoral, sehingga tidak mengherankan kalau penilaian yang diberikan juga kurang memperhatikan asas keseimbangan, bersifat sangat apriori dan memojokkan.

Ketika kita berbicara tentang keberpihakan agen pastoral kepada kaum miskin, kepada kita semua, terlebih lagi kepada agen pastoral akan disodorkan suatu pertanyaan yang sangat menantang. Bukankah semua pihak juga melakukan keberpihakan kepada kaum miskin seperti, pihak pemerintah,

LSM, pihak swasta dan lembaga-lembaga sosial lainnya, yang sudah sangat gigih dan justru sudah jauh lebih dirasakan oleh orang miskin itu sendiri? Bukankah pihak-pihak itu yang justru lebih jago malahan tepat angkat bicara daripada agen pastoral? Jika demikian, lalu dapat ditanyakan, keberpihakan macam apakah yang dilakukan oleh agen pastoral? Pertanyaan-pertanyaan ini yang memberanikan saya mencoba merefleksikan keberpihakan dari sisi sebagai agen pastoral, tidak semata-mata sebagai spekulasi intelektual dan riset kepustakaan serta bela diri agar agen pastoral tidak terusan dicibir, dipersalahkan, malah dihakimi, atau sekadar menepis penilaian yang diandaikan sebelumnya negatif dan tidak semestinya, atau sebagai langkah defensif dan mencari kambing hitam. Tentulah tidak demikian.

Dengan merefleksikan temaini dalam hati kecil saya boleh berharap kiranya tidak ada pihak yang mengklaim yang dianggap paling pantas dari pihak mana pun. Semua pihak dengan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi) justru akan memberi warna tersendiri dalam dinamika keberpihakan kepada kaum miskin. Pemerintah berpihak kepada kaum miskin dengan berbagai program unggulannya seperti memberikan bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM), program bantuan langsung siswa miskin (BSM), peluncuran kartu jaminan sosial dan banyak lagi yang sudah dilakukan pemerintah dalam mempermudah dan membebaskan masyarakat dari kemiskinan. Dengan itu semua menunjukkan bahwa kemiskinan fisik memang dibasmi oleh negara melalui pemerintah, sedangkan kemiskinan rohani oleh Gereja dengan penebusan Kristiani.

Karena itu, Gereja sungguh tidak dapat mengerjakan program seperti pemerintah, untuk mengentaskan kemiskinan materiil, mungkin untuk jenis kemiskinan lainnya Gereja sungguh-sungguh bisa diandalkan. Pertanyaannya ialah mengapa? Ya, selain karena Gereja tidak mempunyai sumber keuangan, tetapi juga karena hal tersebut memang bukan merupakan bidang tugasnya. Mungkin Gereja bisa menguraikan kemiskinan lalu menemukan akar kemiskinan itu, tetapi Gereja tidak dapat berbuat banyak seperti pemerintah. Maka, tidak bisa mengadilinya lantaran tidak berbuat sesuatu seperti pemerintah. Tidak bisa menjabarkan dan berbanding lurus begitu saja apa yang menjadi tugas negara melalui pemerintah dengan tugas Gereja melalui agen pastoral, karena hal itu bisa jadi akan memiskinkan apa yang menjadi tupoksinya masing-masing. Maka juga tidak adil kalau mengukur keberpihakan agen pastoral kepada kaum miskin dengan menggunakan

takaran dari perspektif pemerintah. Jadi tidak ada pihak yang lebih kompeten dan pihak lain diabaikan, akan tetapi justru dengan itu tampak memperlihatkan tupoksi, sehingga akan sangat terbuka di mana pemerintah dan Gereja membangun sinergi dalam spirit kemitraan, dan dengan itu akan terasa lebih efektif memihak kaum miskin.

Kita hidup dalam dunia global. Globalisasi di satu sisi memang mempermudah manusia untuk menggapai apa saja, tetapi di pihak lain globalisasi justru memperdalam jurang pemisah antara kaum kaya dan kaum miskin. Sebagai kaum miskin posisi mereka menjadi tidak menguntungkan. Kaum miskin terkadang mengalami penolakan malahan memperoleh stigma sebagai penyakit masyarakat. Dalam dunia global menghargai manusia memang lebih sebagai faktor ekonomi, kaum miskin sering hanya dilihat sebagai beban, bukan saudara yang tidak beruntung yang perlu ditolong. Betapa sering kaum miskin tidak dihadirkan dalam benak, tidak dipikirkan dan diperhatikan dalam perbincangan mengenai kehidupan bersama, apalagi dalam mengambil keputusan. Kecuali mungkin untuk disingkirkan dan dipinggirkan.¹

Realita ini menantang agen pastoral untuk bersikap, tidak hanya dalam lingkup intern, melainkan dalam lingkup yang lebih luas lagi. Sikap tersebut tidak hanya mencerminkan gambaran hidup yang dialami dan dihadapi Gereja, tetapi juga menggambarkan keprihatinan yang dirasakannya. Sekaligus memperlihatkan siapa dan bagaimana wajah Gereja itu sendiri. Dengan memihak kaum miskin, agen pastoral tentu tidak sedang membuat sensasi agar mendapat pujian atau sekadar mencari popularitas semu, melainkan suatu imperatif pastoral di tengah badai kekejaman zaman serta hingar bingar dunia, yang mengharuskan agen pastoral bersikap dan bertindak demikian, sebagai komitmen iman dan kebajikan kemusiaan.

Di dalamnya ada sikap serta hidup iman yang ditampilkan, karena iman akan Yesus Kristus dan Injilnya harus diwujudkan dalam perbuatan nyata seperti ditandakan "Jika iman itu tidak disertai dengan perbuatan, maka iman itu pada hakekatnya adalah mati" (Yak 2:17). Maka, merupakan suatu tuntutan bagi setiap agen pastoral untuk mempunyai sikap dan mentalitas memihak kaum miskin sebagai bentuk nyata perbuatan iman.

1 Krispurwarna Cahyadi, *Gereja di Tengah Pergumulan Hidup-Catatan Pergumulan Gereja Keuskupan Agung Jakarta*, (Jakarta: Obor, 2004), p. viii.

II. **KEBERPIHAKAN KEPADA KAUM MISKIN: BIDANG ATAUKAH DIMENSI PASTORAL?**

Keberpihakan kepada kaum miskin dapat dipahami dalam dua perspektif berikut yaitu *perspektif pertama*, keberpihakan kepada kaum miskin sebagai sektoral yang dipahami sebagai bidang, dan tindakan tertentu. Dan *perspektif kedua*, keberpihakan kepada kaum miskin sebagai dimensional yang dimengerti sebagai sikap, dimensi, ranah, aspek yang meresapi segala bidang.

Sebagai sektoral berarti yang menyangkut bidang, karena bidang merupakan hal yang erat kaitannya dengan pekerjaan dan tugas pokok seseorang sehari-hari, sedangkan sebagai dimensional yang menyangkut sikap, aspek, ranah, karena dimensi erat kaitannya dengan sikap dan mentalitas seseorang yang mempengaruhi pilihan tindakan individu kepada suatu peristiwa, berdasarkan pendirian dan keyakinannya. Sikap terkait dengan mentalitas setiap orang dalam masyarakat yang akan mempengaruhi pilihan dan tindakannya.

Keberpihakan kepada kaum miskin sebagai sektoral atau bidang berarti upaya efektif untuk pemberantasan kemiskinan supaya kaum miskin mengalami kehidupan yang lebih baik dan sejahtera. Keberpihakan jenis ini menjadi domain negara yang diperani pemerintah, karena bersentuhan erat dengan bidang yang merupakan pekerjaan dan tugas negara, bukan merupakan pekerjaan dan tugas agen pastoral.

Agan pastoral tidak memosisikan diri untuk memberantas kemiskinan dengan mati-matian mengupayakan kesejahteraan bagi kaum miskin, sedangkan keberpihakan kepada kaum miskin dalam arti sebagai dimensi lebih dipahami sebagai sikap dan mentalitas yang meresapi segala bidang karya agen pastoral.

Kalau keberpihakan agen pastoral kepada kaum miskin, tidak dalam arti sebagai bidang paling sedikit sebagai dimensi. Maka, sebagai agen pastoral harus mempunyai dimensi ini dan bukan bidang itu, dalam arti bahwa setiap agen pastoral harus mempunyai pikiran, mempunyai hati, mempunyai sikap dan mentalitas memihak kaum miskin, tetapi bukan untuk mempraktekkan dan secara efektif mengentaskan kemiskinan. Agen pastoral mesti meneladani Yesus yang mempunyai pikiran, mempunyai hati, mempunyai sikap dan mentalitas memperhatikan, mencintai, mengasihi dan mengutamakan kaum

miskin dalam berbagai aspek pewartaan, liturgi, pelayanan, persekutuan dan kesaksian di tengah umat.

III. BERPIHAK KEPADA KAUM MISKIN: SUATU UJIAN BERAT BAGI AGEN PASTORAL

3.1. Teori dan Praktek Tak Selalu Sejalan

Keberpihakan kepada kaum miskin merupakan suatu ujian berat bagi agen pastoral. Dikatakan ujian berat karena agen pastoral senantiasa dibayang-bayangi oleh dua godaan besar ini. Godaan besar pertama ialah teori dan praktek tak selalu sejalan. Kita harus jujur mengakui bahwa keprihatinan mengenai kaum miskin kini makin banyak dibicarakan di dalam Gereja lokal maupun Gereja universal. Kaum miskin menjadi topik perbincangan dan diskusi yang panjang lebar dalam Gereja. Malahan telah menjadi isu-isu strategis, tema pembicaraan dan agenda besar dalam setiap mengadakan Sidang Agung Gereja Katolik Indonesia (SAGKI)². Di antaranya SAGKI 2005 silam misalnya telah menunjukkan perhatian yang sedemikian besar mengenai kaum miskin. Dalam evaluasinya SAGKI menyatakan, keprihatinan terutama mengenai proses kemiskinan dan marginalisasi yang terus berlangsung yang menimpa kaum miskin. Pada kesempatan itu SAGKI menyadari, bahwa kemiskinan adalah satu ketidakadilan publik yang harus diatasi dan dicari pintu masuk penyelesaiannya³.

Demikian pun di Keuskupan Ruteng. Keprihatinan kepada kaum miskin di Keuskupan Ruteng nyaring terasa ketika menggelar sinode⁴

- 2 Gereja Katolik Indonesia maju selangkah lagi dalam inovasi menampakkan wajah Kristus kepada dunia, dengan sebuah putusan strategis menetapkan Sidang Agung Gereja Katolik Indonesia (SAGKI) lima tahunan. SAGKI I tahun 1995, SAGKI II tahun 2000, SAGKI III tahun 2005, SAGKI IV tahun 2010. Sidang Agung ini melibatkan unsur dan elemen umat Allah dari setiap keuskupan di seluruh Indonesia. SAGKI tahun 2005 dihadiri 343 orang utusan dari keuskupan seluruh Indonesia: 111 orang perempuan, 232 orang laki-laki, awam 211 orang, imam dan biarawan/ti 96 orang, uskup 36 orang. Sebuah miniature Gereja katolik Indonesia. Bdk. Dokumen Hasil SAGKI Tahun 2005, (Jakarta: Obor, 2005), pp. 245-259.
- 3 SAGKI, *Bangkit dan Bergeraklah-Dokumentasi Hasil Sidang Agung Gereja Katolik Indonesia 2005*, (Jakarta: Sekretariat SAGKI, 2005), pp. 146-152.
- 4 Sinode sendiri berasal dari kata Yunani yang berarti "berjalan bersama". Dimaksudkan bahwa dengan mengadakan sinode, Gereja Lokal Keuskupan Ruteng hendak melakukan refleksi secara bersama untuk mengarahkan perjalanannya ke depan. Sejauh ini Keuskupan Ruteng telah berhasil

II silam (2006-2007). Sinode II Keuskupan Ruteng telah menjadikan kemiskinan serta isu-isu sosial lainnya sebagai titik tolak refleksi pastoralnya⁵. Pada kesempatan itu, Gereja Lokal Keuskupan Ruteng dengan lantang menyatakan, bahwa akan memberikan perhatian khusus yang menjadi prioritas utama pelayanan dan perwujudan cinta kasih Kristiani yaitu mengenai kaum miskin. Berangkat dari keprihatinan seperti ini, sinode II Keuskupan Ruteng telah menetapkan tahun 2009 lalu sebagai tahun peduli kemiskinan⁶, sebab Gereja lahir dan memiliki panggilan sebagai Gereja Kristus bagi kaum miskin⁷.

menyelenggarakan 2 kali Sinode. Sinode I tahun 1995-1996, Sinode II tahun 2006-2007. Dan sekarang sudah memasuki masa Sinode III tahun 2013-2015, di mana panitia sinode sedang bekerja untuk menyukseskan penyelenggaraan sinode III Keuskupan Ruteng.

5. Persoalan yang dihadapi umat Katolik di Keuskupan Ruteng cukup kompleks. Kompleksnya persoalan umat Katolik disadari dalam Sinode II Keuskupan Ruteng pada tahun 2006-2007. Sinode ini mencatat keprihatinan-keprihatinan sebagai suatu gambaran situasi khas di wilayah ini. Persoalan yang mencolok ialah kemiskinan dan persoalan lain seperti pendidikan dan orang muda, keluarga dan gender, sosial dan politik, ketidakadilan serta mutu lingkungan hidup yang semakin merosot. Persoalan kemiskinan memiliki kaitan dengan masalah-masalah lain seperti pendidikan, pengangguran, kekerasan, dan perantauan. Sinode menyadari bahwa tantangan yang paling memprihatinkan adalah masih banyaknya umat Katolik di wilayah Keuskupan Ruteng yang dililit oleh kemiskinan. Menurut laporan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Manggarai tahun 2010, ada 61,7% penduduk Manggarai tergolong miskin. Itu artinya lebih dari setengah penduduk Manggarai tergolong miskin. Indikator yang dipakai untuk mengukur kemiskinan tersebut menggunakan kriteria yang dipakai BPS. Lihat Pusat Pastoral Keuskupan Ruteng 2008, "Garis-Garis Besar Pedoman Kerja Keuskupan Ruteng 2008-2012". Seri PUSPAS-KR 02/2008. hlm. 16-19 dan BPS *Manggarai Dalam Angka tahun 2010*, p. 432.
6. Salah satu bidang pelayanan strategisnya adalah pastoral sosial ekonomi dan sosio karitatif. Memang dalam hal ini, Gereja Keuskupan Ruteng tentu tidak bermaksud mengatasi masalah kemiskinan itu dengan menyejahterakan kaum miskin. Kalau pun itu ada, tidak efektif untuk mengentaskan kemiskinan, akan tetapi paling tidak, ada yang bisa dan mungkin dapat dilakukan adalah mendorong semua pihak untuk memikirkan dan memberikan perhatian kepada kaum miskin dengan caranya masing-masing, serta memberdayakan kaum miskin dengan berbagai keterampilan sebagai bekal hidup. Dan mungkin saja dengan hal ini dapat memperkecil atau tidak memperlebar perbedaan antara orang kaya dan orang miskin. Dengan begitu tidak ada pihak yang merasa didiskriminasi atau merasa termarginalkan. Dan yang lebih penting lagi ialah menumbuhkan cinta kasih dan perhatian yang ada di dalam diri umat Katolik di Keuskupan Ruteng terhadap kaum miskin supaya mereka juga dapat berkorban dan mempunyai kepekaan dan rasa bertanggungjawab terhadap kaum miskin. Lihat Pusat Pastoral Keuskupan Ruteng 2008, *Op. Cit.*, pp. 17-19.
7. Paul Budi Kleden, "Gereja Dan Politik: Otonomi Versus Keterlibatan" dalam Emanuel J. Embu & Amatus Woi, (Eds.), *Berpastoral Di Tapal Batas* (Maumere:

Keprihatinan dan topik pembicaraan mengenai kaum miskin dalam setiap pertemuan-pertemuan semestinya tidak hanya sebatas gaung, gema atau hanya sebatas rumusan teori-teori yang sangat indah, namun sulit untuk mewujudkannya. Hanya sebatas slogan Kristiani belaka dan suatu persoalan serius bila keberpihakan seperti yang diajarkan Yesus tidak menyentuh dan mampu meringankan kaum miskin dari belenggu kemiskinannya.

Gereja selama ini memang tak pernah putus asa dalam usaha memihak kaum miskin. Banyak sudah yang diperbuat, namun semua upaya itu belum cukup⁸. Kiat Gereja memihak kaum miskin masih belum tercapai sesuai dengan harapan Injil dan cita-cita Gereja⁹. Inilah ujian berat bagi agen pastoral dalam mewujudkan semangat memihak kaum miskin melalui pewartaan, liturgi, pelayanan, persekutuan dan kesaksian. Oleh karena itu, agen pastoral mesti memiliki arah yang jelas dalam menjalankan karya pastoral sesuai dengan konteks dan tuntutan-tuntutan zaman. Mungkin hanya akan mengundang rasa memprihatinkan bila agen pastoral dalam pewartaan, liturgi, pelayanan, persekutuan dan kesaksian kerap kali kurang mempunyai pijakan dari kenyataan akan ranah kehidupan kaum miskin (umat) yang dilayani. Bila demikian, maka usaha untuk menjawab kerinduan kaum miskin seperti yang menjadi keprihatinan dan topik pembicaraan di dalam Gereja menjadi sesuatu yang sulit untuk dilaksanakan.

Ajaran Kristiani seperti Kitab Suci dan *Magisterium* mengajarkan perlu memihak kaum miskin. Dan dalam memihak kaum miskin mesti memperhatikan segala dimensinya baik materiil maupun non materiil. Dari sisi teori memang seharusnya demikian, akan tetapi pada kenyataannya dalam praktek tidak selalu mudah. Teori yang begitu menjanjikan tidak selalu gampang untuk dipraktikkan dalam hidup bersama.

Pilihan berpihak kepada kaum miskin dewasa ini menantang orientasi

Ledalero, 2004), pp. 219-220.

8 SAGKI, *Op.Cit.*, p. 147.

9 Sangat sedikit pelayanan yang berkecimpung dalam pelayanan yang memihak kepada kaum miskin. Sementara itu, karya-karya lain pun kurang menampilkan dimensi ke arah itu. Kalau pun ada jumlahnya amat kecil. Kaum kecil dan lemah banyak dibicarakan dalam pertemuan-pertemuan, namun kurang ada tindak lanjut nyata dari pembicaraan itu. Lihat Sr. Christera, CB., "Kaum Religius Wanita Dan Pemihakan Pada Rakyat Kecil" Dalam *Gereja Indonesia Pasca-Konsili Vatikan II-Refleksi Dan Tantangan*, (Yogyakarta: Kanisius, 1997), p. 144.

hidup Gereja. Realitas sebagaimana yang dikatakan dalam Kitab Suci dan ajaran Gereja untuk mengutamakan kaum miskin masih jauh dari harapan. Padahal, Gereja kita adalah Gereja yang berpihak pada visi utama yaitu kaum miskin. Diharapkan dengan semangat dan identitas seperti itu, Gereja melalui agen pastoral menunjukkan realitas yang sama, yakni memberikan prioritas perhatian kepada kaum miskin.

Kalau dari segi konsep memang terlihat mudah, tetapi kalau sudah sampai pada pilihan-pilihan yang riil dalam mewujudkan visi tersebut dalam tindakan, tidak sesederhana seperti menjelaskan konsep-konsep itu.¹⁰ Terdapat kesenjangan antara teori dan praktek atau terjadi inkonsistensi antara iman dan perbuatan nyata. Teorinya berpihak kepada kaum miskin, tetapi dalam prakteknya hal tersebut dirasa sulit untuk dilakukan.

Perlu sekali dijaga agar tidak adanya jurang pemisah antara agen pastoral dan kaum miskin. Para agen pastoral sebaiknya berusaha agar tidak berada jauh dari konteks, mampu membaca dan memahami situasi dan kondisi kaum miskin. Yang menjadi persoalan ialah bila agen pastoral membatasi diri dan menjauh dari yang ideal seperti yang diharapkan Yesus sendiri yakni memihak, dekat, mengutamakan dan mengasihi kaum miskin. Sangatlah tidak patut bila agen pastoral hanya sampai pada retorika, teori dan belum sampai pada yang konkret, sebab keberpihakan itu tidak sekedar mengumbar janji-janji saleh atau sekedar dipikirkan, tetapi tidak dipraktikkan¹¹.

3.2. Godaan Status Sosial

Godaan besar kedua ialah, godaan status sosial. Suatu godaan yang sangat kuat bagi agen pastoral dewasa ini ialah godaan akan status sosial

10 Mgr. Ignatius Suharyo, *The Catholic Way-Kekatolikan Dan Keindonesiaan Kita* (Yogyakarta : Kanisius. 2009), p. 160.

11 Gereja kita adalah Gereja yang berpihak pada visi utama yaitu kaum miskin. Kemiskinan dan pemiskinan hadir secara nyata, namun sangat sedikit para agen pastoral mencanangkan sebuah gerakan kemanusiaan yang erat dan akrab dengan kaum miskin. Para agen pastoral berada jauh dari konteks, kurang membaca situasi dan kondisi masyarakat. Ada jurang pemisah antara agen pastoral dan masyarakat. Bahkan agen pastoral menjual dan memanipulir orang miskin sehingga mereka menjadi semakin miskin. Dan inilah yang kita sebut sebagai sebuah musibah pastoral yang paling parah. Lihat. Hubert Muda, "Citra Agen pastoral Dewasa Ini" (ms) orasi ilmiah pada acara wisuda program D2-D3 dan dies natalis ke-2 Sekolah Tinggi Pastoral (STIPAS) St. Sirilus Ruteng, 29 September 2005, p. 10.

atau kedudukan dalam masyarakat. Tentu semua orang yang termasuk agen pastoral berhadapan dengan status sosial tersebut. Godaan seperti ini berdampak akan semakin berkurangnya panggilan untuk menjadi agen pastoral seperti terjadi di berbagai belahan dunia dan di Indonesia diharapkan tidak terjadi demikian.

Keinginan untuk menjadi agen pastoral tak jarang dipelesetkan hanya untuk mencari status sosial dalam masyarakat. Perlu sekali menjauhkan persepsi bahwa pilihan untuk menjadi agen pastoral bukan untuk meningkatkan kedudukan, status sosial, mendapatkan kehormatan atau memiliki kekuasaan. Bukan juga untuk memperkaya diri sendiri, mencari dan merebut kedudukan dan keinginan untuk berkuasa¹², namun lebih jauh dan sangat mulia dari keinginan manusiawi, bahwa agen pastoral berkarya dan bekerja di ladang Tuhan, menaburkan benih cinta kasih terutama kepada kaum miskin.

Suatu tuntutan sekaligus tantangan, bahwa di tengah masyarakat maupun di dalam Gereja sendiri, agen pastoral patut menjauhkan diri dari keinginan akan nilai status atau privilese kelas menengah dan lebih tinggi. Hal yang tidak terpuji malahan bertentangan dengan nilai-nilai Injil bila agen pastoral kita zaman ini masih menciptakan sekat-sekat bagi kaum miskin atau agen pastoral hanya mementingkan atau hanya dekat dengan kaum kaya maupun penguasa, kelompok berstatus tinggi dan orang yang mempunyai pengaruh dalam masyarakat, sedangkan dengan kaum miskin menjaga jarak.¹³

Agen pastoral ditantang untuk tidak abu-abu atau hanya sayup-sayup dalam mewartakan tindakan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), perlakuan tidak adil dan korupsi oleh siapa pun yang telah

12 Memprihatinkan situasi kita sebagai rohaniwan dan biarawan/ti, kita tidak perlu banyak waktu untuk berargumentasi dan membela diri, namun toh akhirnya harus secara jujur mengatakan, bahwa kita kaya, kita tidak miskin. Kita kaya, dan dalam kekayaan ini memang menjadi sangat sulit menghayati kemiskinan. Kalau kita sakit, dengan cukup mudah kita mendapatkan perawatan yang baik. Dan agaknya sebagian orang merasa kekayaan kolektif itu belum cukup. Mereka memperkaya diri, ada kekayaan pribadi, ada usaha untuk berdagang dengan tujuan yang tidak jelas, ada upaya mendapatkan keuntungan pribadi dengan menggunakan prinsip usaha yang boleh jadi sangat menindas dan memiskinkan orang lain. Lihat Paul Budi Kleden, *Aku yang Solider, Aku Dalam Hidup Berkaul-Sebuah Refleksi Tentang Aku Yang Berkaul Dari Perspektif Mistik Dan Politik*, (Maumere: Ledalero, 2002), p. 131.

13 Emanuel J. Embu, SVD., *Op. Cit.*, p. 40. Bdk. juga Paul Budi Kleden, *Op.Cit.*, p. 219.

menyengsarakan kaum miskin (orang banyak).¹⁴ Harus memiliki keberanian untuk mengkritisi siapa pun, pihak mana pun yang sewenang-wenang menindas kaum miskin.

Ujian berat bagi agen pastoral adalah untuk menjauhkan diri dari kepentingan pribadi dan lebih mementingkan kepentingan kaum miskin dan rakyat yang tertindas seperti Yesus sendiri.¹⁵ Letak keistimewaan profesi mulia agen pastoral adalah mengasihi, melayani,ewartakan kabar gembira bagi kaum miskin. Profesi semacam ini sangat luhur, jauh dari kelekatan-kelekatan manusiawi sekaligus mengalahkan urusan-urusan atau profesi duniawi yang sifatnya tidak abadi.

Di tengah umat, agen pastoral sebaiknya tampil menyesuaikan diri kepada siapa saja. Demikian pun di tengah-tengah kaum miskin, sepatutnya menjauhkan kesan bahwa agen pastoral memiliki kemewahan duniawi, tetapi lebih menampilkan diri sebagai sosok teladan Yesus sendiri sebagai sahabat bagi kaum miskin.¹⁶ Sebuah keresahan untuk kita sebagai umat beriman Katolik, bila kaum miskin tidak diterima dalam lingkungan Gereja yang cenderung memiliki gaya hidup orang kaya dan kurang menggubris kaum miskin. Situasi seperti ini semakin terasa dalam perkembangan zaman yang begitu pesat.¹⁷

Di zaman ini, banyak orang yang begitu individualis, materialistis, hedonistis dan egoistis, sehingga terciptalah dikotomi antara si kaya dan si miskin. Diharapkan agar agen pastoral tidak terbawa arus dan jatuh dalam situasi hidup di zaman edan ini. Suatu tugas dan

14 Bernadette N. Setiadi, "Sehati-Seperasaan dengan Kaum Tergusur" dalam Georg Kirchberger & John M. Prior (eds.), *Yesus Kristus Penyelamat, Misi Cinta dan Pelayanan-Nya di Asia, Sinode Para Uskup Tentang Asia*, (Ende: Arnoldus, 1999), p. 101.

15 Kiranya kita lebih memperhatikan peran profetis kita, tentu dengan harga mahal yang harus dibayar. Pengalaman menunjukkan bahwa hal ini tidak gampang untuk dilaksanakan lantaran kedekatan hubungan kekeluargaan dengan para pejabat pemerintah, kebutuhan akan jaminan rasa aman, dan juga adanya interese-interese ekonomis. Gereja harus memandang dunia dengan kaca mata kaum tertindas, mereka yang tidak beruntung dan justru harus mengusahakan pertobatan pada pihak mereka yang turut menyebabkan kemiskinan dan kemalangan... Gereja menunaikan tugasnya terhadap kaum berkuasa, bukan dengan mendukung dan menyembunyikan dosa-dosa yang mereka lakukan. Lihat Emanuel J. Embu dan John Prior, *Op.Cit.*, p. 40. Bdk. juga George Kirchberger, *Misi Gereja Dewasa Ini*, (Maumere: Ledalero & Jakarta: Celesty Hieronika, 1999), p. 122.

16 Paul Budi Kleden, *Op.Cit.*, p. 130.

17

tanggung jawab agen pastoral dan semua umat beriman Katolik ialah untuk mengupayakan agar efek negatif dari perkembangan zaman ini tidak menciptakan dikotomi baik dalam lingkup Gereja, dalam bidang pendidikan, bidang kesehatan maupun bidang lainnya.¹⁸

Bila terjadi demikian, maka ruang bagi sumbangan, gagasan, ide dan pemikiran dari kaum miskin tidak pernah terbuka lebar, malahan mereka semakin terlupakan dari perhatian pelayanan Gereja.¹⁹ Maka, para pemimpin, agen pastoral dan semua orang beriman dalam Gereja perlu melakukan olah refleksi untuk tetap setia memperjuangkan hak-hak kaum miskin.

IV. SEPINTAS PEMAHAMAN KEMISKINAN DAN KAUM MISKIN

4.1. Kemiskinan Sebuah Realitas yang Kompleks

Secara harafiah, kemiskinan berasal dari kata dasar miskin yang artinya keadaan tidak memiliki harta benda dan serba kekurangan serta berpenghasilan rendah. Dapat pula diartikan sebagai suatu situasi seseorang atau sekelompok orang yang hanya dapat memenuhi kebutuhan akan makanan dan pakaian serta perumahan yang sangat diperlukan untuk mempertahankan tingkat kehidupan yang minimum.²⁰ Dalam pengertian ini, kemiskinan dipahami sebagai suatu kondisi kekurangan dan ketidakmampuan baik secara individu maupun kelompok yang menyebabkan kondisi seseorang atau sekelompok orang sulit untuk mengembangkan kehidupan yang bermartabat.

Menurut *Federation of Asian Bishops' Conferences* (FABC) kemiskinan adalah:

-
- 18 Lembaga-lembaga pendidikan Katolik belakangan ini sudah terjangkit penyakit komersialisme. Aspek sosial menjadi nomor kesekian. Lembaga-lembaga pendidikan Katolik berlomba-lomba untuk menjadikan dirinya sebagai yang terbaik yang dikemas dengan fasilitas pendidikan yang mewah. Akibatnya, lembaga-lembaga itu harus menanggung biaya operasional yang besar. Siapa yang mampu menanggung biaya itu? Ya, akhirnya orang-orang kaya lah yang mampu menikmati fasilitas tersebut, sedangkan rakyat miskin terhempas kesempatannya. Semangat lembaga pendidikan Katolik sekarang ini sudah jauh berbeda dengan zaman dahulu. Lihat SAGKI, *Op.Cit.*, pp. 146-148.
- 19 Krispurwarna Cahyadi, *Pastoral Gereja-Paroki Dalam Upaya Membangun Gereja yang Hidup*, (Yogyakarta: Kanisius, 2009), p. 111.
- 20 Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), p. 749.

Kondisi seseorang tidak mempunyai kemungkinan untuk mendapatkan pembekalan dan sumber-sumber materiil, yang mereka butuhkan untuk menciptakan hidup yang sungguh manusiawi bagi diri sendiri. Kemungkinan itu tertutup, sebab mereka hidup dalam penindasan yaitu struktur-struktur sosial, ekonomi, dan politik yang sarat dengan ketidakadilan (FABC I 19).²¹

Sementara menurut ILO (*International Labour Organization*) kemiskinan ialah suatu keadaan di mana kebutuhan-kebutuhan pokok tidak terpenuhi antara lain kebutuhan akan makanan, pakaian, rumah, air bersih, sarana kesehatan, pengobatan, pendidikan, pekerjaan dengan upah yang memadai, termasuk kebutuhan dan partisipasi dalam pengambilan keputusan yang menyangkut eksistensi seseorang. Keadaan seperti ini jelas membuat seseorang tidak mampu hidup secara manusiawi.²²

Setidaknya ada dua hal yang mau diperlihatkan dari definisi kemiskinan yang ada ini. *Pertama*, kemiskinan tidak lagi dipahami hanya sebatas ketidakmampuan ekonomi atau hidup di dalam kondisi kekurangan sandang, pangan dan papan, melainkan kemiskinan dipandang sebagai kondisi seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhi hak-hak dasarnya secara layak untuk menempuh dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Artinya kemiskinan sebagai suatu kondisi yang menyeret manusia pada kondisi serba kekurangan dan yang menyebabkan manusia hidup secara tidak bermartabat untuk mengembangkan semua dimensi dan jati dirinya sebagai manusia. Kemiskinan berakibat pada hilangnya martabat manusia dalam hidupnya. Karena itu, berbicara tentang kemiskinan pertama-tama ialah berbicara soal martabat kita sebagai manusia.

Kedua, kemiskinan bukanlah suatu keadaan yang diinginkan, melainkan karena peluang untuk hidup layak tertutup. Tertutupnya kemungkinan untuk memperoleh hidup yang manusiawi tersebut disebabkan oleh adanya ketidakadilan struktural yang melembaga dalam struktur sosial, ekonomi dan politik. Inilah yang membuat kaum

21 Pernyataan Sidang "Pewartaan Injil Di Asia Zaman Sekarang" dalam Federation of Asian Bishops' Conferences (FABC I) *Dokumen Sidang-Sidang Federasi Konferensi-Konferensi Para Uskup Asia, Manila, Filipina 29 Nofember 1970-199*, (ter. R. Hardawiryana), (Jakarta: Departemen Dokumentasi dan Penerangan Konferensi Waligereja Indonesia, 1995), p. 40.

22 Bdk. Franz Daehler & Eka Budianta, *Pijar Peradaban Manusia*, (Yogyakarta: Kanisius, 2000), hlm. 196.

miskin sedemikian tidak mampu menguasai sarana sosial, ekonomi, politik dan berbagai fasilitas lain yang tersedia, sehingga mau tidak mau harus hidup dalam kekangan dan perangkap yang menentukan dan membatasi kebebasan untuk menikmati hidup layak sebagai manusia.

Pada umumnya ketika kemiskinan itu dibicarakan, yang dimaksudkan ialah kemiskinan materiil. Kemiskinan ini menjelma dalam berbagai kebutuhan dasar manusia yang sifatnya material yaitu: sandang, pangan dan papan. Dari sudut materiil, kemiskinan menggambarkan adanya kelangkaan materi atau barang-barang yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari, seperti makanan, pakaian dan perumahan.²³ Kemiskinan dalam arti ini dapat dipahami sebagai situasi kesulitan yang dihadapi orang dalam memperoleh barang-barang yang bersifat kebutuhan dasar yang mencukupi demi kelangsungan kehidupan.

Kemiskinan materiil dapat menjadi sumber kemiskinan dari aneka sudut lainnya²⁴, artinya faktor kekurangan persediaan sandang, pangan dan papan, dapat menyebabkan orang tidak mampu untuk mensejahterakan hidup, tidak dapat menikmati hidup yang layak. Maka, seorang masuk dalam kategori miskin apabila tidak mampu memenuhi standar minimum kebutuhan pokok untuk dapat hidup secara layak.

Pemahaman kemiskinan semacam ini sangat bermanfaat untuk mempermudah membuat indikator orang miskin, tetapi tentu juga disadari bahwa pemahaman seperti ini sangat kurang memadai karena tidak cukup untuk memahami realitas kemiskinan dan dapat menjerumuskan ke kesimpulan yang salah bahwa menanggulangi kemiskinan cukup hanya dengan menyediakan bahan makanan yang memadai.

Kemiskinan dari sudut materiil sering muncul dalam wujud rendahnya penghasilan, sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup sampai batas yang layak. Misalnya, tidak tercapainya kebutuhan primer yang menyebabkan kelaparan, sakit yang berkepanjangan karena ketiadaan

23 Maria Hartiningsih, "Kemiskinan" dalam *Bangkit dan Bergeraklah*, (Jakarta: Obor, 2005), pp. 314-316.

24 Berbicara tentang kemiskinan begitu dalam dan luas. Mengingat kedalaman dan keluasan pemahaman tentang kemiskinan itu, maka di sini hanya dijelaskan kemiskinan dari sudut materiil saja. Masih sangat terbuka untuk diuraikan lagi ke dalam aspek lain yang lebih luas dan dalam lagi, seperti kemiskinan rohani (spiritual), sosial, politik, budaya, pendidikan dan lain-lain.

biaya untuk pengobatan, tidak dapat menyekolahkan anak, busung lapar, tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap, menggelandang, mengemis dan sebagainya.

Itulah sebabnya manusia membutuhkan aneka sarana untuk hidup dan berkembang layak manusiawi. Maka, kalau manusia tidak mempunyai atau kekurangan sarana itu, manusia tidak dapat hidup layak dan tidak dapat berkembang.

4.2. Indikator Kemiskinan

Agak sedikit kesulitan memang untuk mengukur tingkat kemiskinan seseorang, sebab dalam pengalaman observasi selalu menunjukkan bahwa masalah kemiskinan mempunyai banyak segi dan dimensi, mulai dari yang bersifat materi, miskin pengetahuan, miskin sosial, miskin politik, miskin budaya, miskin peluang, miskin rohani sampai pada yang bersifat mental, sehingga tidak mudah untuk menentukan tolok ukur yang tepat mengenai kemiskinan.²⁵ Dengan demikian juga tidak gampang untuk mengatakan siapa itu orang miskin.

Ilmu sosial memberikan dua indikator mendasar yang bisa dipakai untuk mengukur tingkat kemiskinan. *Pertama*, secara materiil kebutuhan hidup mendasar atau primer tidak terpenuhi secara layak. *Kedua*, secara non materiil tidak memiliki kesempatan untuk mengakses hal-hal yang diperlukan untuk pengembangan dirinya seperti misalnya pendidikan, partisipasi secara penuh dalam pengambilan keputusan, menikmati rekreasi secara layak, memperoleh perlindungan hukum, pelayanan kesehatan, keadilan sosial dan rasa aman.²⁶

Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan 14 kriteria yang menandai kemiskinan²⁷,

25 J.B Banawiratma & J. Müller, *Berteologi Sosial Lintas Ilmu-Kemiskinan Sebagai Tantangan Hidup Beriman*, (Yogyakarta: Kanisius, 1993), p. 124.

26 *Ibid.*, p. 129.

27 Pemerintah kemudian menggunakan acuan dari BPS ini untuk Pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) atau sekarang BLSM. Badan Pusat Statistik (BPS), menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Dengan pendekatan ini, dapat dihitung yaitu persentase penduduk yang berada di bawah Garis Kemiskinan (*Head Count Index*). Metode yang digunakan adalah menghitung Garis Kemiskinan (GK), yang terdiri dari dua komponen yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Bukan-Makanan (GKBM). Garis kemiskinan merupakan garis yang membagi atau

1. Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8m² per orang.
2. Jenis lantai bangunan tempat tinggal terbuat dari tanah/bambu/ kayu murahan.
3. Jenis dinding tempat tinggal terbuat dari bambu/rumbia/kayu berkualitas rendah/tembok tanpa plester.
4. Tidak memiliki fasilitas buang air besar/ bersama-sama dengan rumah tangga lain.
5. Sumber penerangan rumah rangka tidak menggunakan listrik.
6. Sumber air minum berasal dari sumur/ mata air tidak terlindungi/ sungai /air hujan.
7. Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/ arang/ minyak tanah.
8. Hanya mengkonsumsi daging/ susu/ ayam satu kali dalam seminggu.
9. Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun.
10. Hanya sanggup makan sebanyak satu/ dua kali dalam sehari.
11. Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas/ poliklinik.
12. Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah: petani dengan luas lahan 0.5 ha, buruh tani, nelayan, buruh perkebunan atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan di bawah Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah) per bulan.
13. Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga: tidak sekolah/ tidak tamat SD/ hanya SD.

yang menjadi batas penduduk miskin dan tidak miskin atau dapat juga dikatan sebagai standart hidup minimum yang sesuai dengan kondisi masyarakat. Garis Kemiskinan (GK) merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin. Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilokalori per kapita per hari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll). Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Lihat. <http://www.Indikator-kemiskinan-di-rumah-tangga-berhak-menerima-bantuan-langsung.html>, diakses pada tanggal 12 April 2012.

13. Tidak memiliki tabungan/ barang yang mudah dijual dengan nilai Rp.500.000.-(lima ratus ribu rupiah), seperti: Sepeda motor (kredit/ non kredit), emas, ternak, kapal motor atau barang modal lainnya.

4.3. Evaluasi tentang Kemiskinan

Harus diakui bahwa ada kondisi yang menyebabkan kemiskinan itu bisa terjadi. Misalnya, karena faktor alam seperti bencana alam, sumber daya alam yang terbatas, tanah tandus, kemarau panjang, penggunaan teknologi yang rendah dan faktor mental kaum miskin (masyarakat). Mental kaum miskin berkaitan dengan perihidup sehari-hari. Tak kurang orang berpendapat bahwa kemiskinan juga terjadi akibat kesalahan orang miskin sendiri yang malas, tidak mau maju, tidak jujur, tidak mau berkembang dan sebagainya.²⁸

Di dalam masyarakat memang masih dijumpai sebagian kecil kelompok orang miskin yang mempunyai sifat demikian, namun tidak boleh menutup mata bahwa sebagian besar kaum miskin yang ada di sekitar kita adalah orang-orang yang telah bekerja keras dan ulet, akan tetapi kehidupan mereka tetap saja tidak berubah. Kita dapat melihat petani-petani kecil yang telah bersusah payah mengolah lahan, menanam berbagai tanaman kemudian setelah panen jual ke pasar. Para petani berangkat pagi hari menuju ke pasar sering hanya dengan berjalan kaki.²⁹ Kemiskinan yang terjadi pada petani kecil jelas tidak dapat disalahkan pada petani itu sendiri, melainkan karena struktur ekonomi yang sering merugikan posisi mereka. Harga pertanian yang tidak boleh melonjak, sementara harga kebutuhan sehari-hari mengalami kenaikan yang pesat seiring dengan kenaikan harga bahan bakar minyak dan gaji pegawai negeri. Kita tidak dapat menutup mata pada kenyataan, bahwa kemiskinan itu terjadi bukanlah sebagai akibat kehendak jelek orang miskin itu sendiri, melainkan akibat strukturisasi proses-proses ekonomis, politik, sosial, budaya, dan ideologis.³⁰

Inilah yang disebut sebagai permainan kekuasaan. Permainan

28 A. Suryawasita, SJ., "Analisa Sosial" dalam J.B. Banawiratma, (Ed.), *Kemiskinan dan Pembebasan*, (Yogyakarta: Kanisius, 1987), p. 28-29.

29 Hal ini terjadi di pasar-pasar tradisional seperti di Narang, Todo dan Langke Majok kecamatan Satar Mese Barat. Para petani yang ingin menjual barang dagangannya seperti sayur, kopi, buah-buahan harus berjalan kaki. Hanya sebagian kecil dari mereka ke pasar menggunakan transportasi ojek maupun dengan bemo.

30 F. Magnis Suseno, *Op. Cit.*, p. 39.

kekuasaan di sini berarti masyarakat tidak diberi peluang yang baik untuk berkembang. Struktur masyarakatnya yang timpang, yang tidak menguntungkan bagi golongan yang lemah dan tidak menjamin masyarakat mencapai kebahagiaan. Kemiskinan tersebut disebabkan oleh ketidakadilan. Ketidakadilan yang dimaksud dalam hal ini merupakan ketidakadilan struktural yaitu ketidakadilan yang melembaga dan disebut juga ketidakadilan sosial yang telah meresapi struktur dan lembaga-lembaga masyarakat³¹, sehingga mau tidak mau kaum miskin harus terperangkap dalam ketidakadilan. Maka, kaum miskin menjadi miskin bukan karena tidak mau berusaha memperbaiki nasibnya tetapi karena usaha yang mereka lakukan selalu terbentur pada sistem atau struktur masyarakat yang berlaku. Sering terjadi bahwa penderitaan dalam bentuk busung lapar diakibatkan oleh kurang efektifnya peran struktural pemerintah dalam memberi jaminan ketersediaan bahan pangan bagi masyarakat. Kendatipun sebenarnya faktor kelangkaan bahan makanan di tingkat masyarakat bukan karena lemahnya produksi pangan tetapi lebih karena nyaris absennya fasilitas pemerintah untuk memenuhi kebutuhan itu. Kurangnya peran pemerintah sebagai fasilitator tampak dari lemahnya koordinasi pusat dengan daerah sebagai pelaksana teknis setiap kebijakan.³²

4.4. Kaum Miskin

Menurut UU RI Nomor 13 Tahun 2011 kaum miskin³³ adalah "Orang yang sama sekali tidak mempunyai mata pencaharian dan atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya".

Sedangkan menurut Musyawarah Antar Serikat religius Indonesia (MASRI)³⁴ kaum miskin yaitu:

Mereka yang tak berdaya karena berbagai macam pemiskinan...yang

31 Magnis Suseno, "Keadilan dan Analisis: Segi-segi Etis" dalam J.B Banawiratma (ed.), *Op. Cit.*, p. 38.

32 Kornelus Sipayung, "Upaya Gereja Mengentas Kemiskinan" dalam A. Eddy Kristanto (ed.), *Spiritualitas Sosial-Suatu Kajian Kontekstual*, (Yogyakarta: Kanisius, 2010), p. 213.

33 UU RI Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin, (Fokusmedia: Bandung, 2012), p. 2.

34 C. Putranta, S.J., "Gereja Kaum Miskin dalam Federasi Konferensi Uskup-uskup Asia" dalam J.B. Banawiratma (Ed.) *Op. Cit.*, p.97.

membuat semakin banyak orang hidup semakin tidak manusiawi dan tidak menggambarkan bahwa dia adalah citra Allah yang bermartabat sebagai manusia (no. 6). Pada umumnya mereka hidup di bawah taraf kewajaran manusiawi (no.7). Lebih lanjut, dokumen ini menyebut orang kecil (miskin) sebagai mereka yang tersisih secara sosial akibat perbedaan-perbedaan masyarakat atas dasar distribusi yang tidak adil (no.16).

Mencermati definisi yang ada ini, sekurang-kurangnya memperlihatkan dua hal tentang siapa kaum miskin itu. *Pertama*, kaum miskin adalah orang-orang yang berkekurangan secara materijil karenanya tidak dapat memenuhi kebutuhan yang dapat dikategorikan layak. Mereka menjalani hidup secara sederhana dan pendapatan yang diperoleh sangat terbatas. Dan inilah yang menyebabkan tingkat kesulitan yang dihadapi kaum miskin semakin berat dibandingkan dengan yang lain. *Kedua*, kemiskinan yang dialami kaum miskin bukan sesuatu yang kebetulan belaka, melainkan ada suatu proses yang berlangsung semakin intensif, yaitu suatu proses dimana proses sosial, ekonomi, politik cenderung menyingkirkan dan semakin banyak warga masyarakat tidak mendapat kesempatan menikmati hasil sumber kekayaan masyarakat.

Secara konkret dalam kehidupan sehari-hari kita dapat menjumpai kaum miskin seperti misalnya kelompok pengemis, anak-anak jalanan, gelandangan, pedagang asongan, buruh harian atau buruh kasar, petani yang tidak mempunyai lahan sendiri atau petani garapan, orang-orang yang menawarkan jasa menghela debu dari kaca mobil, jasa membersihkan debu dari sepatu, pengamen yang sedikit memaksa untuk memberi sumbangan, pemulung, mereka yang tinggal di bawah kolong-kolong jembatan, mereka yang tidak memiliki tempat bernaung dan pembantu rumah tangga.

V. KEBERPIHAKAN KEPADA KAUM MISKIN

5.1. Mengapa Berpihak Kepada Kaum Miskin

Gereja Katolik hadir ke tengah dunia untuk semua orang, bukan hanya untuk orang miskin saja melainkan orang kaya juga. Gereja tetap memberikan perhatian yang seimbang dan tidak pandang bulu dalam pelayanan. Gereja justru dikagumi dan dihargai karena perhatian dan pelayanan bagi semua terutama perhatian yang mendahulukan kaum miskin. Istilah berpihak itu penting. Apalagi kalau yang dipihaki itu

adalah kaum miskin. Memihak atau berpihak kepada kaum miskin sering kali ditafsirkan dan diartikan juga membuang dan menentang yang lain dan hanya mementingkan kelompok tertentu, sedangkan yang ini dan yang itu tidak atau malahan menyingkirkan, membenci, memusuhi, dan mengucilkan kaum kaya dan pihak lain dan hanya mengambil kaum miskin saja.³⁵ Berpihak kepada kaum miskin di dalam Gereja Katolik sama sekali tidak dimaksudkan dalam arti itu.

Keberpihakan dari kata "berpihak" yang artinya membela.³⁶ Membela dalam arti ini tidak untuk membenci kaum kaya atau memusuhi pihak mana pun juga, melainkan kaum miskin harus menjadi subjek perhatian yang didahulukan, bukan dalam arti eksklusif. "Membela kaum miskin bukan berarti menyingkirkan pihak lain, tetapi mengundang semua orang untuk terlibat dalam gerak bersama kaum miskin untuk membangun masyarakat yang adil bersaudara."³⁷ Membela berarti sikap "memberikan perhatian dan pelayanan bagi rakyat atau kelompok-kelompok pinggiran dalam masyarakat."³⁸ Demikian ditulis oleh Martin Chen dan J. B. Banawiratma dalam kapasitas mereka sebagai teolog dan akademisi.

Dalam Gereja Katolik dilarang dan tidak dibenarkan untuk membuang, menentang, membenci, menyisihkan dan memusuhi yang lain, karena Yesus sendiri melarang kita untuk membenci atau memusuhi yang lain-lain. Demikian agen pastoral tidak boleh jatuh pada posisi ekstrim seperti itu kepada yang lain, melainkan kedua-duanya yaitu kaum miskin dan kaum kaya. Tidak boleh memilih golongan tertentu dan mengabaikan atau melawan golongan lain. Tidak boleh diskriminasi, semua harus diperhatikan dan dilayani tanpa pandang bulu, karena Kristus wafat bagi semua dan Tuhan menghendaki keselamatan untuk semua. Demikian pun Gereja hadir untuk semua tanpa kecuali yang miskin dan kaya.

Dengan berpihak kepada kaum miskin Gereja melalui agen pastoral tidak menjadi berat sebelah, hanya untuk golongan tertentu, melainkan

35 Franz Magnis-Suseno, *Menjadi Saksi Kristus Di Tengah Masyarakat Majemuk*, (Jakarta: Obor, 2004), pp. 190-192. Bdk. Charles E. Curran, *Buruh, Petani, Dan Perang Nuklir*, (Yogyakarta: Kanisius, 2007), pp. 267-269.

36 Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Op. Cit.*, p. 767.

37 Martin Chen, *Teologi Gustavo Gutierrez – Refleksi dari Praksis Kaum Miskin*, (Yogyakarta: Kanisius, 2002), p. 121.

38 J. B. Banawiratma, (ed.), *Op. Cit.*, p. 158.

umum dan terbuka bagi semua. Kalau agen pastoral mengambil sikap berpihak kepada kaum miskin, tidak pernah berarti bahwa membuang, membenci, memusuhi, menentang dan menyisihkan siapa pun, akan tetapi dalam perbuatan dan prakteknya perlu ada prioritas, siapa yang didahulukan dan siapa yang tidak didahulukan. Maka, yang didahulukan ialah kaum miskin dan barulah menyusul orang kaya. Beberapa alasan mengapa Gereja melalui agen pastoral mengambil sikap berpihak kepada kaum miskin:

Pertama, kaum miskin tidak dapat menolong diri sendiri, maka mereka harus ditolong. Kaum miskin adalah orang yang mudah dilukai, mudah menjadi korban kekerasan, baik kekerasan yang ditimbulkan manusia lain, maupun yang diakibatkan oleh alam. Kita menyaksikan, bahwa yang sering menjadi korban bencana alam adalah orang-orang miskin, orang-orang yang tidak mampu membangun rumah yang baik di tempat yang aman, yang bebas banjir dan lain sebagainya.³⁹ Hidup dalam keadaan terbelenggu tanpa harapan, tidak mempunyai pendidikan yang dapat membuka mata, tidak mempunyai kuasa, koneksi dan modal, banyak halangan dan rintangan untuk maju.

Keadaan ini menyebabkan kaum miskin harus terdesak untuk menerima kehidupan apa adanya dengan segala konsekuensinya. Padahal kita tahu bersama, bahwa sebagian besar kemiskinan yang dialami oleh kaum miskin bukan karena kesalahan kaum miskin itu sendiri, melainkan karena keadaannya memang demikian dan mereka kurang dibantu oleh pemerintah dan pejabat jarang memikirkan nasib kaum miskin.

Berhadapan dengan situasi dan kondisi yang demikian, agen pastoral tidak boleh diam dan menonton begitu saja. Justru dalam kesempatan pertama mesti hadir, berperan dan memberikan perhatian kepada kaum miskin. Mengenai bagaimana ekspresi kehadiran dan peran di tengah hiruk pikuk kehidupan kaum miskin, secara eksplisit diungkapkan oleh Paus Yohanes Paulus II dalam ensiklik *Centesimus Annus* (CA) dengan mengatakan, mereka yang tidak berdaya dan miskinlah yang terutama diperhatikan, sedangkan kaum kaya bisa dengan cara lain untuk dapat mengatasinya dalam menolong diri mereka sendiri. Kaum kaya mempunyai akses lebih banyak untuk memperoleh berbagai pertolongan baik yang diusahakan dengan kemampuannya sendiri maupun dari

39 Paul Budi Kleden, *Op.Cit.*, p. 112.

sesama lebih gampang bila dibandingkan dengan kaum miskin, karena kaum kaya mempunyai jaringan keuangan dan segala sesuatunya serba ada, sedangkan kaum miskin hidup dengan segalanya serba kekurangan (lih. CA 10).

Kaum kaya tidak didahulukan karena mereka mempunyai jaringan keuangan dan segala sesuatunya serba ada serta mempunyai banyak kemungkinan untuk merencanakan segala sesuatu termasuk merencanakan masa depan yang lebih baik. Di sisi lain, kaum miskin sebaliknya, kemiskinan menyebabkan tidak ada kemungkinan untuk merencanakan masa depan, kemiskinan seakan membuat mereka ketiadaan waktu dan daya untuk membuat sebuah perencanaan demi masa depan. Yang kaya mempunyai kepastian dan jaminan hidup melalui apa yang dimilikinya, sementara kaum miskin dihantui oleh berbagai ketidakpastian yang menganga di depan matanya.⁴⁰

Kedua, dewasa ini, orang lebih cenderung membantu yang kaya daripada yang miskin. Sebagian besar hidup orang miskin bergantung pada orang lain, pada orang yang memberi sedekah, pada orang yang bersedia menyekolahkan anaknya, pada orang yang mau mengongkos biaya pengobatannya. Mereka menjadi bergantung, tak berdaya, senantiasa ditentukan oleh yang lain. Mereka mengalami kemiskinan secara lebih pahit, ketika menyadari ketidakberdayaan dalam membantu keluarganya atau orang yang sangat dicintainya yang sedang dalam kesusahan.⁴¹ Dalam ketidakberdayaan, kaum miskin justru gampang sekali dilupakan, diabaikan dan disingkirkan. Dan mereka juga tidak dapat melakukan protes apa-apa. Malahan mereka justru kehilangan perhatian dari sesamanya. Ini disebabkan oleh karena orang sekarang mempunyai kecondongan lebih senang dengan sikap memihak kaum kaya daripada memihak kaum miskin.⁴²

Dalam pola pemikiran untung rugi sikap berpihak kepada kaum miskin memang dianggap sebagai sikap yang tidak menguntungkan. Dalam pola pandang balas jasa juga terjadi hal yang senada, memihak kepada kaum miskin ditempatkan sebagai perbuatan yang tidak

40 *Ibid.*, p. 107.

41 *Ibid.*, pp. 106-107.

42 Georg Kirchberger, *Misi Gereja Dewasa Ini*, (Mauere: Ledalero & Jakarta: Celesty Hieronika, 1999), p. 121.

mungkin mendapat balas jasa.⁴³ Kita berhadapan dengan kenyataan dimana dalam diri manusia modern lebih berkembang sikap mencari dan menguntungkan dan memberi kemungkinan akan adanya balas jasa.

Manusia modern mempunyai prinsip, bahwa membantu kaum miskin dianggap sebagai sikap yang tidak menguntungkan dan tidak mungkin mendapat balas jasa, sedangkan kalau membantu kaum kaya di lain kesempatan akan mendapat balasannya yang mungkin jauh lebih besar dan bisa jadi dalam banyak hal akan sangat menguntungkan.

Terdapat sedikit sekali kesadaran dan tanggung jawab kita semua kepada kaum miskin. Kita justru gampang sekali melupakan dan mengabaikan kaum miskin. Kaum miskin dilupakan dan dikeluarkan dari kesadaran kita bersama. Malahan kita semua "menganggap kaum miskin sebagai suatu beban dan halangan yang menjengkelkan yang hanya menghabiskan hasil jerih payah orang-orang lain saja" (CA 28, bdk. CA 58).

Kepekaan akan hidup sesama yang membutuhkan pertolongan semakin lemah, kurang tertanam, dan kurang dimiliki oleh setiap orang. Belum tertanam dalam diri kita suatu pemahaman, memiliki tanggung jawab pelayanan bagi kaum miskin. Hal ini memang bisa disebabkan oleh banyak faktor seperti sikap ingat diri, mengejar kesuksesan dan prestasi, hasil dan karir, uang dan fasilitas yang menghambat kita untuk mengemban kewajiban kemanusiaan dan tuntutan iman memihak kepada kaum miskin. Karenaitu, melalui Kompendium Ajaran Sosial Gereja (selanjutnya Komp. ASG) mengetengahkan seperti apa dan bagaimana harus hadir, terlibat dan berperan dalam memperhatikan kaum miskin. Dalam ASG No. 390 ditulis, "Gereja mengajarkan bahwa seseorang harus membantu sesamanya di dalam berbagai kebutuhannya dan memenuhi masyarakat manusia dengan karya-karya belas kasih di bidang jasmani dan rohani yang tak terbilang banyaknya" (bdk. juga KGK 2448).

Itu berarti bahwa setiap orang Katolik berkewajiban dan bertanggungjawab untuk memperhatikan mereka yang berada dalam keadaan kesusahan dan mengulurkan tangan supaya mereka harus dibantu (lih. PP 49, CA 36). Sudah menjadi kewajiban kita semua agar memperhatikan kaum miskin, sebagaimana dinyatakan dalam ASG No. 387 yang mengutip langsung dari Mat 26:11 dengan mengatakan "orang-

43 Krispurwarna Cahyadi, *Op.Cit.*, p. 130.

orang miskin selalu ada padamu” (bdk. Mrk 14:7; Yoh 12:85). Kaum miskin tetap selalu dipercayakan kepada kita dan itulah tanggung jawab kita dan padanya kita akan dihakimi pada akhir zaman (bdk. Mat 25:31-46). Demikian pun “Tuhan memperingatkan kita bahwa kita akan dipisahkan dari Dia apabila kita mengabaikan perhatian kita kepada kebutuhan-kebutuhan mendesak dari orang miskin dan kecil yang adalah saudara-saudari-Nya” (ASG 388, KGK 1033).

Kita memberikan perhatian, membantu dan menolong mereka yang miskin, bukan sekadar sikap baik-baik saja atau hanya karena perasaan murah hati sesaat yang meledak-ledak, melainkan merupakan suatu tuntutan iman dan sebagai kewajiban kemanusiaan yang memang mengharuskan kita untuk bersikap demikian.

Ketiga, kaum miskin merupakan ciptaan Allah, yang berwajah dan bernama seperti kita.

Kenyataan ini mengingatkan kita pada kebenaran sejagat yang tak tebantahkan seperti tertulis dalam “Kitab Suci mengajarkan bahwa manusia diciptakan menurut gambar Allah” (GS 12), akan tetapi citra itu dilecehkan oleh kemiskinan. Kemiskinanlah yang merendahkan harkat dan martabat mereka sebagai citra Allah. Kemiskinan juga menghalangi mereka untuk mengembangkan bakat dan kemampuan yang diberikan Tuhan (bdk. CA 34). Dengan demikian dapat dibayangkan bahwa kemiskinan akan menghilangkan kemungkinan dalam diri kaum miskin untuk berperan aktif dan kreatif dalam membangun dunia. Padahal, dunia yang dikehendaki oleh Allah adalah dunia yang semakin selaras, damai, pantas dan bermartabat yang di dalamnya potensi manusia dapat diintensifkan menurut Pencipta. Kaum miskin justru semakin jauh dari apa yang menjadi kehendak Allah di awal penciptaan. Mereka terhalang dengan sedemikian rupa kesulitan karena harus melewati berbagai rintangan untuk memenuhi harapan itu.

Di sinilah kemiskinan sebagai suatu bobrok yang bertentangan dengan kehendak Allah sendiri dan sebuah tragedi yang akan membikin kaum miskin menderita dan terhambat mengembangkan kemanusiaanya secara wajar. Gereja tidak dapat tinggal diam atau netral menghadapi kondisi-kondisi yang tak manusiawi yang dialami kaum miskin dalam masyarakat, karena Gereja didorong untuk tetap berpegang pada nilai

yang dimaklumkan Alkitab dan menanggapi situasi-situasi konkret manusia. Dengan dasar inilah, maka Gereja tidak boleh melupakan kaum miskin. Gereja melalui agen pastoral mesti mengalihkan perhatian kepada kaum miskin, sebab mereka adalah manusia yang diciptakan sama seperti kita, hanya tidak beruntung.

Sebagai Gereja, kita mempunyai tanggung jawab terhadap kaum miskin. Kita diajak agar masih ada kepekaan yang tinggi terhadap ketidakpastian hidup kaum miskin. Kita mesti mengalihkan pembicaraan dan pikiran kepada wajah-wajah Allah (bdk. Mat 25:40) yang tertatih-tatih menjalani hidup dengan beban yang kian melukai dan mematikan. Kita diajak untuk hadir, terlibat dan berperan di sana demi memulihkan dan mengembalikan jati diri kaum miskin sebagai ciptaan Allah yang tercemar dan dirusak oleh kemiskinan dan penderitaan (bdk. CA 53) dan supaya martabat dan kreativitas kaum miskin semakin meningkat dan berkembanglah kemampuannya untuk menanggapi panggilan Allah sendiri (lih. CA 29), sehingga sebagai citra Sang Pencipta, kaum miskin sungguh dapat hidup dengan layak, aman dan berkembang dari semua dimensi kemanusiaannya.

5.2. Keberpihakan Kepada Kaum Miskin dalam Kitab Suci dan Ajaran Gereja

5.2.1. Keberpihakan Kepada Kaum Miskin dalam Kitab Suci

Berpihak kepada kaum miskin bukan hal baru bagi Gereja. Pilihan untuk berpihak kepada kaum miskin sudah dimulai dan berakar sejak dari Perjanjian Lama, Perjanjian Baru dan Gereja awal. Keberpihakan kepada kaum miskin sejak itu, dilakukan baik secara pribadi maupun dilakukan secara terorganisir dengan baik. Dengan begitu dapat dikatakan, bahwa Gereja dalam Perjanjian Lama maupun Gereja dalam Perjanjian Baru dan sesudahnya tidak sekadar tempat untuk upacara keagamaan, tetapi sebagai pusat pelayanan yang berorientasi kepada kaum miskin.

Mengenai bagaimana Allah memperlihatkan keberpihakan kepada kaum miskin, banyak ditulis dalam Alkitab. Kita tidak akan bicara satu demi satu tentang hal itu di sini. Dalam Perjanjian Lama, Allah benar-benar memperlihatkan keberpihakan kepada kaum miskin. Allah melarang untuk mengambil bunga uang dari orang miskin. Sebaliknya meminta untuk memberikan pertolongan kepada mereka yang tidak

mempunyai kemampuan untuk bertahan dan menjalani hidup. Dan justru kepada orang miskin perlu diberi kesempatan untuk memperbaiki nasib mereka dengan pembebasan bunga dalam usaha maupun ketika mereka terkena musibah, sebab banyak orang miskin menjadi semakin miskin karena terjerat oleh bunga dalam sistem perdagangan. Kemiskinan akan semakin mengancam hidup mereka bilamana praktik bunga dalam pinjam meminjam dijalankan. Hal ini ditulis dalam Kitab Imamat:

Apabila saudaramu jatuh miskin, sehingga tidak sanggup bertahan di antaramu, maka engkau harus menyokong dia sebagai orang asing dan pendatang, supaya ia dapat hidup di antaramu. Janganlah engkau mengambil bunga uang atau riba dari padanya, melainkan engkau harus takut akan Allahmu, supaya saudaramu dapat hidup di antaramu. Janganlah engkau memberi uangmu kepadanya dengan meminta bunga, juga makananmu janganlah kauberikan dengan meminta riba. Akulah Tuhan, Allahmu, yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir, untuk memberikan kepadamu tanah Kanaan, supaya Aku menjadi Allahmu. Apabila saudaramu jatuh miskin di antaramu, sehingga menyerahkan dirinya kepadamu, maka janganlah memperbudak dia. Sebagai orang upahan dan sebagai pendatang ia harus tinggal di antaramu; sampai kepada tahun Yobel ia harus bekerja padamu. Kemudian ia harus diizinkan keluar dari padamu, ia bersama-sama anak-anaknya, lalu pulang kembali kepada kaumnya dan ia boleh pulang ke tanah milik nenek moyangnya. Karena mereka itu hamba-hamba-Ku yang Kubawa keluar dari tanah Mesir, janganlah mereka itu dijual, seperti orang menjual budak. Janganlah engkau memerintah dia dengan kejam, melainkan engkau harus takut akan Allahmu (Imamat 25:35-43).

Demikian pun terjadi pada zaman Yesus. Pada zaman Yesus kaum miskin mendapat tempat pertama sasaran perutusan-Nya. Di mata Yesus semua orang sama dan sederajat. Atas kesamaan dan kesederajatan itulah, maka Yesus menunjukkan sikap memperhatikan semua orang. Meskipun demikian Yesus tetap memperlihatkan perhatian dengan fokusnya adalah kaum miskin. Yesus berpihak kepada kaum miskin karena kemiskinan menyebabkan mereka menderita, kemiskinan menyebabkan mereka tidak berdaya, baik secara sosial, ekonomi maupun politik.

Yang Yesus lakukan untuk mewujudkan tugas pengutusan-Nya ialah pembebasan bagi orang-orang tak berdaya. Tidak hanya membebaskan mereka dari kuasa dosa, tetapi terlebih membebaskan orang-orang miskin dari keterbatasannya akibat penindasan yang dilakukan terhadap mereka. Untuk itu, Yesus menyatakan pembelaan-Nya terhadap segala

bentuk penindasan terhadap kaum miskin sebagaimana tertulis dalam Injil Lukas:

Roh Tuhan ada pada-Ku, sebab Ia telah mengurapi Aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus Aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang (Luk 4:18-19).

Kesadaran untuk berpihak kepada kaum miskin juga sudah bertumbuh dan berkembang dengan baik sejak Gereja Perdana. Gereja perdana melakukan sesuatu yang konkret dan kreatif untuk mengatasi kemiskinan di antara mereka sendiri. Untuk mengurangi kemiskinan, mereka bersolider dengan orang miskin. Mereka mulai menjual tanah dan harta miliknya. Kemudian hasilnya diserahkan kepada para rasul untuk mencukupi kebutuhan hidup orang miskin. Mereka bersedia menjual semua yang mereka miliki dan mempercayakan segala sesuatu kepada para rasul, sehingga mereka dapat memberi kepada semua orang seturut apa yang mereka butuhkan. Mengenai hal ini ditulis dalam Kisah Para Rasul:

Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorangpun yang berkata, bahwa sesuatu dari kemempunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kemempunyaian mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorangpun yang berkekurangan di antara mereka; karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah, menjual kemempunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul; lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf, yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang, miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul (Kis 4:32-37).

Apa yang dilakukan oleh Para Rasul mau memperlihatkan bahwa sikap saling berbagi dan hidup dalam kebersamaan dan persaudaraan mesti selalu ada dalam Gereja. Meskipun dalam hidup Gereja zaman sekarang, tidak harus persis seperti dilakukan oleh Gereja perdana, sebab zamannya sudah berbeda dan Gereja sudah berkembang luas, tetapi bahwa semangat hidup dari Gereja perdana harus dipelihara dan

diteruskan khususnya dalam usaha Gereja untuk memperhatikan kaum miskin.

5.2.2. Keberpihakan Kepada Kaum Miskin dalam Ajaran Gereja

Tema kemiskinan dan kaum miskin selalu menjadi pusat perhatian dalam Ajaran Sosial Gereja (ASG) (lih. CA 54). Seperti apa dan bagaimana persisnya perhatian Gereja kepada kaum miskin banyak diungkapkan melalui ensiklik-ensiklik para Paus di Roma sejak dulu hingga sekarang. Satu di antaranya ialah Paus Yohanes Paulus II. Beliau sangat konsen memberi perhatian kepada kaum miskin, karena mengalami permasalahan yang sangat kompleks.

Kompleksnya persoalan yang dialami kaum miskin diwarnai dan dicekam oleh masalah sosial yang tidak terbilang jumlahnya, seperti pembagian sumber daya alam dan kekayaan dunia yang tidak adil, diskriminasi sosial dan rasial serta etnis dan politis, pelanggaran martabat dan hak asasi manusia. Dan masih banyak orang yang diterlantarkan, dihisap, mengalami alienasi. Hidup mereka rapuh, memprihatinkan, dan sangat menyedihkan (lih. CA 42, SRS 53). Penderitaan karena kemelaratan dan kelaparan tidak terbilang jumlahnya (paling banyak menimpa kaum perempuan) dan tak terhitung jumlah anak-anak yang kekurangan gizi (lih. PP 45, bdk. PP 53).

Penindasan dan penghisapan ekonomis dilakukan kepada orang kecil, terutama petani dan buruh. Proses industrialisasi dan perkembangan teknologi serta ilmu pengetahuan kian pesat, seakan membuat manusia terlempar keluar dari kehidupan sesama dan juga mempengaruhi mentalitas manusia serta menimbulkan persaingan dan kesenjangan ekonomi yang tidak sehat antara manusia maupun negara. Jurang pemisah antara orang kaya dan kaum miskin semakin tajam. Kaum kaya semakin makmur karena memiliki segalanya, sedangkan kaum miskin yang tidak memiliki apa-apa semakin miskin, tergilas, dan tidak berdaya (lih. SRS 16, PP 33).

Tanggapan Gereja terhadap berbagai keprihatinan yang dialami kaum miskin ini, amat jelas di antaranya terdengar nyaring ketika Konsili Vatikan II menyatakan "kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan manusia dewasa ini, terutama yang miskin dan terlantar, adalah kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan murid-murid Kristus pula" (GS 1).

Dalam penghayatan yang demikian, sangat mendesak bagi Gereja untuk memihak kepada kaum miskin. Gereja diajak untuk tidak boleh menutup mata kepada realitas kemiskinan (bdk. PP 74), sebab dengan menutup mata kepada realitas sosial yang menyangkut martabat manusia berarti mengabaikan kewajiban dan bahkan ada kesan membiarkan penindasan bertumbuh subur dan berkembang (lih. CA 53). Maka, pada peringatan seratus tahun *Rerun Novarum* (RN), Paus Yohanes Paulus II menyerukan supaya sikap mengutamakan kaum miskin senantiasa menjadi pergumulan dan pilihan yang tiada hentinya mewarnai kehidupan Gereja sebagai perwujudan dalam pengamalan cinta kasih Kristiani (lih. CA 11, bdk. SRS 42). Selanjutnya dalam dokumen yang sama Paus Yohanes Paulus II menandakan:

... sikap mengutamakan kaum miskin kendati tanpa menolak kelompok-kelompok lain atau menjalankan diskriminasi kepadanya. Sebab sikap mengutamakan itu tidak hanya terbatas pada kemiskinan materiil, karena sudah jelas bahwa khususnya di masyarakat sekarang terdapat begitu banyak kemiskinan. Bukan di bidang perekonomian semata-mata, melainkan juga di bidang pendidikan dan keagamaan. Cinta Gereja penuh keprihatinan kepada kaum miskin, yang memang sangat dititik beratkan olehnya dan tetap berlangsung sebagai suatu aspek dalam pusaka tradisinya, mendorong untuk menatap dunia yang memang ditandai kemajuan teknologi dan ekonomi, tetapi toh dilanda oleh kemelaratan sedemikian parahnya, sehingga mencapai proporsi-proporsi yang amat mengerikan (CA 57).

Paus Yohanes Paulus II memberi perhatian pada persoalan kemiskinan dan kaum miskin, karena kemiskinan yang dialami kaum miskin mencakup keseluruhan dimensi kehidupan mereka sebagai manusia. Kaum miskin diprioritaskan karena terjepit oleh beban kemiskinan yang merambah ke dalam berbagai macam dimensi kehidupan, tidak hanya materiil tetapi juga menyentuh dimensi pendidikan dan keagamaan. Karena itu kaum miskin diprioritaskan. Mereka diprioritaskan karena terjepit oleh beban kemiskinan yang merambah ke dalam berbagai macam dimensi kehidupan, tidak hanya materiil tetapi juga menyentuh dimensi pendidikan dan keagamaan. Maka, dalam mewujudkan cinta kasih Kristiani Gereja memberi perhatian yang sangat besar kepada macam-macam kemiskinan sebagai persoalan sosial yang meliputi seluruh aspek kehidupan manusia.

Gereja menunjukkan sikap penuh cinta kasih, sebab dalam diri kaum miskinlah Yesus hadir secara istimewa. Seperti Yesus tidak pilih kasih dalam memberikan perhatian dan pelayanan, demikian pun Gereja. Di sinilah yang membedakan bentuk keberpihakan Gereja kepada kaum miskin dengan lembaga sosial lainnya. Cinta kasih dan penderitaan kaum miskin menjadi alasan bagi Gereja untuk berpihak kepada kaum miskin (bdk. CA 58), sebab Gereja diutus ke dunia untuk membawa manusia kepada keselamatan, baik yang bersifat rohani maupun jasmani. Tidak hanya membawa manusia pada keselamatan hidup di akhirat, tetapi juga keselamatan hidup nyata di dunia dari kemiskinan dan ketertindasan (bdk. GS 39). Dengan memihak kaum miskin Gereja mau mengangkat kembali martabat manusia sebagai citra Allah, sebagai ciptaan Allah yang paling mulia dan luhur dari segala ciptaan (bdk. CA 11, CA 53).

VI. MACAM-MACAM KEBERPIHAKAN KEPADA KAUM MIKSKIN

6.1. Keberpihakan Materiil (Ekonomi)

Keberpihakan kepada kaum miskin ditempatkan dalam kerangka keprihatinan Gereja dewasa ini. Untuk menggambarkan keprihatinan itu Konsili Vatikan II tentang Kerasulan Awam *Apostolicam Actuositatem* (AA) artikel 8 mengatakan:

Di mana saja ada orang yang berkekurangan makanan dan minuman, pakaian, perumahan, obat-obatan, pekerjaan, pendidikan, kemudahan yang diperlukan untuk hidup yang benar-benar manusiawi, di mana saja ada orang yang tersiksa karena kesehatannya yang rapuh, yang menderita karena dibuang dan ditahan, di situ cinta kasih Kristiani harus mencari dan menemukan mereka dengan perhatian yang intensif serta meringankan beban mereka dengan memberikan bantuan (bdk. Komp. ASG 385).

Jelaslah, bahwa setiap anggota Gereja memiliki tanggung jawab berpihak kepada kaum miskin. Bukan pertama-tama untuk maksud menyelesaikan persoalan kemiskinan, melainkan meringankan beban sebagai perwujudan iman dan cinta kasih Kristiani dalam masyarakat. Dalam arti inilah kita menempatkan keberpihakan ekonomi melalui pendekatan lebih bercorak karitatif.

Pilihan keberpihakan secara karitatif didasari oleh kesadaran Gereja sejak semula bahwa sesama yang menderita menjadi tanggung jawabnya (lih. SRS 31). Dalam ensiklik *Populorum progressio* (PP) Paus Paulus VI

menegaskan, bahwa sebagai seorang beriman Katolik "tidak seorang pun boleh mengabaikan persoalan sesamanya yang hidup dalam kemiskinan" (PP 74). Karena itu, Gereja sejak awal menempatkan keprihatinan kepada kaum miskin dan bekerja tanpa henti-hentinya membantu, membela dan membebaskan yang tertindas melalui karya amal yang tak terhitung jumlahnya (ASG 389, bdk. KGK 2444).

Cara Gereja memihak kaum miskin melalui karya karitatif memang tidak dapat menjawab persoalan kaum miskin, mengingat kemiskinan merupakan persoalan sedemikian kompleks, namun setidaknya, bantuan materi yang diberikan secara spontan dalam bentuk barang dan uang, harapannya dapat meringankan beban hidup kaum miskin bukan untuk membebaskan kaum miskin dari kemiskinan. Apa yang dilakukan lebih merupakan ungkapan iman dan cinta kasih Kristiani yang konkret dengan membantu yang membutuhkan uluran tangan dari sesamanya. Perbuatan karitatif itu tetap baik untuk dilaksanakan karena perbuatan tersebut berdasarkan cinta kasih kepada sesama.

Dalam ensiklik *Deus Caritas Est* (Allah adalah kasih), Paus Benediktus XVI amat menekankan pentingnya karya-karya karitatif karena di mana pun di dunia ini, selalu ada orang-orang yang sungguh tidak mampu berbuat apa-apa kecuali menerima belas kasihan dari orang lain. Pelayanan karya karitatif merupakan bagian hakiki tugas Gereja yang mendasar dewasa ini (lih. 32). Dari semua karya itu, memberi derma kepada orang miskin adalah satu dari kesaksian utama cinta kasih Kristiani (lih. ASG 390, KGK 2448). Diharapkan agar setiap orang Katolik memberikan bantuan kepada kaum miskin sebagai perwujudan iman dan cinta kasih Kristiani.

Keberpihakan secara materiil dapat diusahakan melalui: menyantuni orang miskin dengan diorganisasikan pelbagai bantuan dengan menyisihkan sedikit uang, pakaian, makanan untuk mereka yang tidak beruntung dalam hidup. Prakteknya dapat berlangsung dalam momentum peringatan hari raya keagamaan seperti pada masa Adven, Natal, Prapaskah, Paskah dan dalam keadaan darurat seperti bencana alam, sakit berat, kelaparan, dan lain sebagainya.

Melalui bantuan itu umat Katolik diajak untuk menghayati solidaritas Kristus, dengan mengumpulkan dana dari hasil mati raganya. Tujuannya

ialah untuk ikut membangun kehidupan sesama yang lebih baik. Keberpihakan semacam ini amat dirasakan dan membantu kaum miskin yang memang tidak memiliki apa-apa. Selain itu, hendaknya memberi dukungan kepada pelbagai usaha untuk mengembangkan perekonomian kaum miskin. Misalnya mengembangkan koperasi kredit, bagi hasil, mendukung unit usaha kecil, mendukung secara aktif usaha-usaha membekali dan meningkatkan keterampilan kaum miskin, agar dengan keterampilan itu kaum miskin dapat membangun sendiri kehidupannya (bdk. CA 15). Usaha-usaha itu didasarkan oleh solidaritas untuk rela menolong sesama. *Octogesima Adveniens* (OA) artikel 5 menandakan: "Suatu kesadaran yang diperbaharui akan tuntutan-tuntutan Injil mewajibkan Gereja untuk melayani semua orang, membantu mereka yang memahami masalah mereka yang gawat dalam segala dimensinya, serta meyakinkan mereka bahwa sungguh mendesaklah solidaritas manusia sekarang ini".

Berpihak kepada kaum miskin tidak cukup dengan menyantuni, membekali, meningkatkan keterampilan, tetapi yang tidak kalah pentingnya ialah mendorong terwujudnya iklim ekonomi yang adil dan bermartabat. Dalam nota pastoral Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) 2006 Para Uskup mengatakan "iman mendorong kami, para Waligereja Indonesia, untuk ikut aktif mengupayakan tata ekonomi yang adil dan yang sangat menentukan terwujudnya masyarakat yang manusiawi dan bermartabat". Penindasan secara ekonomi dan keterasingan ekonomi yang dialami kaum miskin harus makin kuat disuarakan dalam pewartaan agen pastoral, sebagai wujud nyata memihak kaum miskin.

6.2. Keberpihakan Melalui Pendidikan dan Kesehatan

Kemiskinan merupakan salah satu sebab mengapa banyak anak tidak sekolah dan paling sedikit membaca dan menulis. Begitu juga dengan yang sakit tidak dapat mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik, karena ketiadaan biaya untuk pengobatan. Gereja memberikan perhatian besar kepada pendidikan dan kesehatan, di antaranya dengan didirikannya lembaga-lembaga pendidikan dan rumah sakit bermerek Katolik. Melalui lembaga-lembaga ini Gereja Katolik hadir secara nyata di tengah masyarakat Indonesia (lih. Gereja Di Asia 36-37)⁴⁴. Dengan

44 Bdk. Piet Go, *Pastoral Sekolah*, (Malang: Dioma 1991), p. 56.

mengusung komitmen pelayanan yang bersemangatkan melayani kaum miskin tanpa mengabaikan pihak mana pun. Memang pelayanan ini, di masa lampau sangat populer, namun di saat terjadi persaingan akan tantangan zaman dan mutu pelayanan, maka meningkat pula biaya pembelian sarana yang semakin canggih.

Dengan demikian, pelan-pelan orang miskin tersingkirkan. Kemudian lembaga-lembaga ini hanya dapat dijangkau oleh orang-orang berada. Sekolah-sekolah dan rumah-rumah sakit yang dikelola Gereja kualitasnya lumayan meningkat, akan tetapi meningkat pula biaya yang harus diterima dari orang yang mau menggunakan jasa sekolah atau kesehatan. Orang miskin dengan keterbatasan dana sulit untuk menikmati pelayanan dari lembaga-lembaga Gereja tersebut.⁴⁵

Dalam situasi yang diwarnai persaingan ini, sebaiknya pemilik dalam hal ini yayasan-yayasan Katolik, agar tetap memberikan prioritas bagi kaum miskin. Sistem yang terbangun selama ini sebaiknya dievaluasi lagi dan beralih kepada sistem yang lebih berpihak pada kaum miskin. Kita tentu saja tidak menolak keberadaan lembaga-lembaga ini dalam Gereja, akan tetapi menolak sistem yang tidak berpihak pada kaum miskin.

Kenyataan bahwa sekolah-sekolah kita semakin hanya dapat dimasuki oleh orang-orang kaya, harus dibalik. Sekolah-sekolah kita harus juga terbuka bagi orang miskin. Misalnya, dapat diusahakan agar sekian persen dari murid terdiri atas anak-anak dari keluarga miskin, sedangkan bagi kaum miskin yang tidak sempat menikmati pendidikan formal perlu dibekali dengan keterampilan yang dapat dijadikan sebagai bekal hidup untuk mandiri.

Demikian pun dengan karya kesehatan jangan sampai terjebak dalam persaingan keuntungan finansial semata, tetapi kaum miskin perlu mendapat akses pada pelayanannya. Oleh karena itu, lembaga-lembaga Katolik perlu mengarahkan diri secara baru kepada kaum miskin.

6.3. Keberpihakan demi Keadilan

Dalam masyarakat dirasakan adanya kesenjangan yang besar antara yang menikmati kekayaan dan kekuasaan, sedangkan yang

45 Y.B. Mangunwijaya, "Gereja dan Pendidikan Dalam Situasi Kini Yang Serba Kompleks" dalam *Gereja Indonesia Pasca Vatikan II-Refleksi dan Tantangan*, (Yogyakarta: Kanisius, 1997), pp. 334-347. Bdk. juga SAGKI, *Op.Cit.*, pp. 147-148.

lainnya menderita serba kekurangan (lih PP 33, bdk. SRS 16). Tak jarang kesenjangan itu disumbangkan oleh ketidakadilan, baik ketidakadilan ekonomi, politik, sosial yang sifatnya kompleks. Orang bisa menjadi amat kaya, karena kekuasaan politik yang dimilikinya, sedang orang lain menjadi amat miskin karena ia tidak mempunyai kekuasaan ekonomi dan politik apa pun. Gereja tidak pernah berkompromi dengan ketidakadilan apa pun juga.

Dalam perjalanan Gereja keadilan menjadi hal penting. Paus Yohanes Paulus II mengatakan, cinta kasih bagi sesama dan di tempat pertama cinta kasih bagi mereka yang miskin di dalamnya Gereja melihat Kristus sendiri, menjadi konkret dalam perjuangan demi keadilan (lih. CA 58). Di sini Gereja memperlihatkan bahwa mencintai kaum miskin tanpa usaha menegakkan keadilan tidaklah utuh (bdk. *Iustitusa In Mundo* 6). Pewartaan Injil perlu memperhatikan pengaruh timbal balik antara Injil dan kehidupan konkret manusia, sebab rencana penebusan itu menyentuh situasi-situasi konkret ketidakadilan yang mesti diberantas dan keadilan yang mesti dipulihkan (lih. *Evangelii Nuntiandi* 31).

Perhatian besar kepada keadilan memang tidak hanya berhenti dengan khotbah dan kritik sosial semata, melainkan perlu memperkuat lagi lembaga keadilan dan kebenaran, baik di tingkat KWI maupun di Keuskupan-Keuskupan yang ada di provinsi Gereja Indonesia. Agar kehadiran lembaga ini sangat dibutuhkan oleh situasi setempat dalam memberi perlindungan kepada yang tidak berdaya dan tidak bersuara seperti petani, nelayan dan buruh.

Dengan demikian, maka kritik terhadap Gereja yang lebih canggih ke dalam, tapi canggung ke luar, Gereja lebih tampil sebagai ibadat ketimbang gerakan sosial, seksi liturgi jauh lebih aktif daripada seksi sosial paroki, mulai terjawab dan terbantahkan.

6.4. Keberpihakan Psikologis

Keberpihakan secara psikologis di antaranya dapat dilakukan dengan memberikan kasih persaudaraan yang mendalam dan memberikan perhatian pada kaum miskin yang membutuhkan uluran tangan dan pertolongan kita semua (lih. CA 48). Bantuan itu tidak harus uang, tetapi bisa lewat peneguhan, kesediaan mendengarkan, dan membantu

memberikan jalan keluar untuk mengatasi masalah kaum miskin.⁴⁶ Mereka juga didekati dan diberi bimbingan dengan pendampingan pastoral yaitu proses untuk membantu secara psikologis mengalami keputusan karena masalah-masalah hidupnya. Pendampingan itu akan membantu mereka untuk kuat mengambil keputusan-keputusan yang positif dan pemecahan atas masalah-masalah yang dialaminya.

Kaum miskin membutuhkan agar ada yang memperhatikan dan membutuhkan mereka. Kebutuhan akan perhatian dan dibutuhkan ini, barangkali lebih daripada kebutuhan akan makanan, pakaian dan perumahan. Dengan cara ini, kaum miskin akan merasa tersapa, diperhatikan, didengarkan dan merasa hidupnya berharga, merasakan betapa Tuhan mencintai mereka, memperhatikan mereka. Sebab, dengan melayani kaum miskin semakin nyata tindakan pelayanan kita kepada Tuhan, karena melayani mereka yang miskin adalah wujud melayani Tuhan. Seperti yang Tuhan katakan berbuat demikian kepada yang paling hina sebenarnya berbuat untuk-Nya (lih. Mat. 25:40).

7. KBERPIHAKAN AGEN PASTORAL KEPADA KAUM MISKIN

7.1. Siapa itu Agen Pastoral?

Penggunaan istilah agen pastoral berbeda satu keuskupan dengan keuskupan lainnya di Indonesia. Di Keuskupan Atambua misalnya, istilah yang digunakan tenaga pastoral. Di Keuskupan Manokwari Sorong istilah yang dipakai adalah agen pastoral. Dan Keuskupan Ruteng sendiri akrab dengan istilah agen pastoral. Yang terpenting mempunyai arti dan maksud yang sama. Penggunaan istilah boleh saja berbeda sehingga tidak perlu diseragamkan. Agen pastoral adalah petugas Gereja yang tertahbis dan tidak tertahbis. Tugas mereka berkaitan erat dengan bidang penggembalaan. Agen pastoral merupakan orang-orang yang telah menjalani proses pendidikan formal dan non formal serta yang mendapat penugasan resmi dari uskup untuk pelayanan kepada umat Allah, (entah karena pelantikan, SK, pengutusan, *missio canonica*, dan sebagainya). Mereka terdiri dari kelompok profesional dan terlatih yang secara khusus mengemban tugas pembangunan umat dan memberikan

46 Mgr. Pain Ratu, "Peran Awam Berpengaruh Dalam Kehidupan Gereja dan Calon Imam" dalam Paul Budi Kleden & Philipus Tule, (Eds.), *Rancang Bersama Awam dan Klerus*, (Maumere: Ledalero, 2008), p. 84.

jasa layanan yang berkaitan dengan gembala dan penghidupannya. Mereka membaktikan dirinya untuk melayani umat-Nya dan membawa umat kepada keselamatan. Mereka memberikan diri dengan seluruh kualitas dirinya demi melayani umat Allah.⁴⁷

Jadi, agen pastoral di dalam Gereja adalah orang-orang tertahbis seperti Imam diosesan, Religius, Diakon, dan orang-orang yang tidak tertahbis seperti Bruder, Suster, dan Kaum Awam terbaptis seperti Katekis dan umat Allah (lih. AG 38-41) yang dipercayakan untuk menjalankan tugas penggembalaan melayani umat Allah yang mendapat penugasan resmi dari uskup. Dalam berbagai corak keterlibatan, agen pastoral akan menjadi pemimpin yang berperan seperti Sang Gembala Agung yang tetap menyertai umat-Nya dalam perjalanan hidup mereka (Mat 8:20).

7.2. Berpihak Kepada Kaum Miskin Bukan Pekerjaan Agen pastoral

Keberpihakan kepada kaum miskin bukan bidang yang merupakan tugas pokok atau pekerjaan utama agen pastoral sehari-hari. Agen pastoral tidak dipanggil atau ditugaskan secara khusus untuk menjalankan pekerjaan semacam itu. Mereka berpihak kepada kaum miskin sebagai kebajikan kemanusiaan dan ekspresi imannya yang diejawantahkan melalui sikap dan mentalitas pribadi yang mewarnai seluruh karya pewartaan, liturgi, pelayanan, persekutuan dan kesaksian yang tetap bersifat pastoral, bukan dalam artian agen pastoral bekerja dalam bidang pemberantasan kemiskinan. Kalau pun agen pastoral ikut berperan dalam kegiatan karitatif, hanya sebatas untuk meringankan beban penderitaan kaum miskin, bukan untuk menyelesaikan persoalan kemiskinan yang dialami kaum miskin.

Motivasinya jauh dari keinginan untuk memenuhi kebutuhan hidup kaum miskin. Kemiskinan merupakan problem yang begitu luas dan rumit. Kebutuhan yang ada selalu jauh lebih besar daripada kemampuan untuk mengatasi dan menanganinya. Jelas sama sekali tidak dimaksudkan agar agen pastoral memberantas kemiskinan dengan melakukan perbuatan membantukaum miskin, sehingga dapat memenuhi kebutuhan pokoknya sehari-hari, melainkan agar seluruh aspek pewartaan, liturgi, pelayanan,

⁴⁷ Bdk. Mgr. F.X., Hadisumarta, "Keuskupan Manokwari Sorong Gerak dan Perkembangannya" dalam F. Hasto Rosariyanto, (Ed.), *Bercermin Pada Wajah-Wajah Keuskupan Gereja Katolik Indonesia*, (Yogyakarta: Kanisius, 2001), p. 70.

persekutuan dan kesaksian makin menjadi sensitif, jeli memperhatikan dan memahami situasi hidup kaum miskin yang makin mengalami penderitaan, ketidakadilan dan diskriminasi di tengah masyarakat.

Dimensi agen pastoral tak pernah akan menghapus kemiskinan di tengah masyarakat. Tugas dan pekerjaan untuk memberantas kemiskinan merupakan bidang tugas dan pekerjaan pokok dari negara. Negaralah yang bertanggungjawab membebaskan manusia dari penderitaannya yang disebabkan oleh keterbelakangan, kemiskinan, penyakit, ketakutan dan ketidakpastian hukum serta sepenuhnya mengusahakan keadilan dan memperjuangkan kebenaran dalam segala bidang hidup manusia. Sudah menjadi kewajiban negara melalui pemerintah untuk memperhatikan kesejahteraan umum dan mendorong setiap struktur masyarakat termasuk dunia usaha untuk memberi sumbangan guna meningkatkan kesejahteraan itu bagi semua orang termasuk kaum miskin (lih. CA 11).

Jadi, pemerintah adalah pihak yang mempunyai tanggung jawab besar untuk mengusahakan kesejahteraan bagi semua orang dan mengentaskan masyarakat dari kemiskinan (lih. CA 8). Meskipun begitu tidak berarti, bahwa agen pastoral berdiam diri saja terhadap berbagai kompleksitas persoalan yang dialami kaum miskin.

Justru agen pastoral harus terlibat dalam persoalan kehidupan kaum miskin dan mesti mempunyai keprihatinan dan turut memikirkan serta memberikan sumbangan bagi penyelenggaraan kehidupan bersama itu. Dan justru di sinilah, mereka akan mengambil sikap berpihak kepada kaum miskin, manakala pemerintah yang diserahi tugas dan tanggung jawab untuk seharusnya menegakkan keadilan, hukum, pemberantasan korupsi dan memperhatikan kehidupan orang banyak semakin menjauh dan tidak dapat memenuhi harapan-harapan masyarakat pada umumnya terutama harapan kaum miskin untuk tertolong. Manakala pemerintah melalaikan tugas-tugas itu yang dapat menyebabkan masyarakat terseret pada pusaran ketidakadilan (lih. CA 8).

Agan pastoral justru akan mengambil sikap memperhatikan entakah pemerintah berbuat demikian atau tidak. Bukan menganjurkan cara dan mengajarkan politik dan ekonomi agar lebih berkembang, mengembangkan bisnis, memajukan pertanian, memajukan komunikasi,

pemeliharaan kesehatan, hukum dan lain-lain, melainkan bagaimana sikap dan mentalitas agen pastoral akan masalah-masalah baik dan jahat atau benar dan salah dalam bidang-bidang tersebut. Dalam *Sollicitudo Rei Socialis* (SRS) Paus Yohanes Paulus II mengatakan "Gereja menunaikan misinya mewartakan Injil dan menunaikan pelayanannya di dunia ini. Dan Gereja sebagai pakar prihal kemanusiaan merasa wajib untuk memperluas tugas perutusannya pada pelbagai bidang usaha-usaha manusia (SRS 41)".

Demikian juga Konsili Vatikan II, melalui Konstitusi Pastoral tentang Gereja di dunia dewasa ini *Gaudium et Spes* (GS) menandakan bahwa:

Gereja tidak sedikit pun tergerak oleh ambisi duniawi; melainkan hanya satulah maksudnya: yakni, dengan bimbingan Roh Penghibur melangsungkan karya Kristus sendiri, yang datang ke dunia untuk memberi kesaksian akan kebenaran; untuk menyelamatkan, bukan untuk mengadili; untuk melayani, bukan untuk dilayani (GS 3).

Selanjutnya dalam *Quadragesimo Anno* (QA) Paus Yohanes Paulus II mempertegas kembali bahwa: "Gereja tidak dipercayai tugas membimbing orang-orang menuju kebahagiaan yang bersifat melulu dan akan hilang, melainkan ke arah kebahagiaan kekal. Gereja tidak boleh acak-acakan mencampuri perkara-perkara duniawi (QA 41)".

Pendeknya *Magisterium* menegaskan, bahwa bukanlah kewenangan Gereja untuk menggarap program-program politik, sosial dan ekonomi. Meskipun demikian, campur tangan Gereja dalam bidang-bidang sosial, ekonomi dan politik benar-benar bernilai sah, terutama kalau Gereja melalui agen pastoral mulai berbicara dari sudut tinjauan moral (lih. SRS 41). Gereja melalui agen pastoral tetap melandaskan kewenangannya berbicara mengenai masalah-masalah sosial dan ekonomi pada "segala sesuatu yang berkaitan dengan hukum moral" (QA 41).

Gereja melalui agen pastoral melakukan demikian sebagai bagian tak terpisahkan dari komitmen mewujudkan panggilan hidup dalam memberikan kesaksian Injili. Yang merupakan aspek sosial yang perlu

ditekankan dalam seluruh karya pastoral yang menggambarkan sikap sosial yang lahir dari iman yang diwartakannya.

Motivasi yang mendasarinya adalah cinta kasih Kristiani dan iman yang dihayati (bdk. CA 58). Oleh iman dan cinta kasih Kristianilah yang justru mendorong agen pastoral untuk turut bertanggungjawab dan terus-menerus mengupayakan agar dalam berbagai aspek pewartaan, liturgi, pelayanan, persekutuan dan kesaksian bersentuhan dengan berbagai situasi kompleks dan realitas yang dialami kaum miskin di tengah masyarakat, sebagai tolok ukur kesejatian iman dalam mewujudkan cinta kasih Kristiani.

Bobot iman seorang agen pastoral akan diukur dari seberapa jauh menunjukkan sikap dalam memberikan perhatian yang mengutamakan kaum miskin. Di sinilah agen pastoral dituntut untuk di satu sisi mesti memiliki hubungan yang mendalam dengan Tuhan, namun pada sisi lain agen pastoral juga mesti terbuka matanya bagi persoalan manusia dan dunianya.

7.3. Agen pastoral Tidak Perlu Alih Fungsi Pekerjaan

Keberpihakan agen pastoral kepada kaum miskin tetap merupakan sikap dan mentalitas bukan merupakan pekerjaan pokoknya sehari-hari. Karena itu, agen pastoral tidak perlu alih fungsi pekerjaan, dalam arti bahwa harus meninggalkan tugas pokoknya seperti sebagai imam, suster, bruder, katekis lalu mengabdikan diri untuk melayani kaum miskin, akan tetapi, justru di dalam menjalankan tugas seperti sebagai imam, suster, bruder, katekis dapat mengusahakan agar semua aspek pewartaan, liturgi, pelayanan, persekutuan dan kesaksian sungguh diresapi oleh semangat keberpihakan kepada kaum miskin.

Seperti telah disentil, bahwa sikap terkait dengan mentalitas setiap orang dalam masyarakat. Bisa terjadi bahwa sikap setiap orang bisa berbeda dan bermacam-macam berhadapan dengan ketidakadilan. Sebagai contoh, seorang hakim yang menegakkan hukum dan keadilan. Penegakkan hukum dan keadilan merupakan pekerjaan sehari-hari seorang hakim yang merupakan tugas pokoknya, tetapi setiap orang mempunyai sikap dan mentalitas untuk menegakkan hukum dan keadilan juga, tanpa harus menjadi seorang hakim di pengadilan.

Begitu pun dengan agen pastoral, dapat menegakkan hukum dan keadilan dan menumbuhkan hukum dan keadilan bagi kaum miskin dengan berbagai bentuk dan caranya yang berbeda dengan hakim tadi, tetapi esensi sama tanpa harus meninggalkan pekerjaan pokoknya sebagai agen pastoral. Demikian pun misalnya, dalam membela hak petani dan nelayan. Tidak perlu menjadi petani atau nelayan, tetapi bagaimana memperhatikan nasib petani dan nelayan dalam aspek-aspek pewartaan, liturgi, pelayanan, persekutuan dan kesaksiannya sehari-hari.

Untuk menegakkan keadilan, membela hak petani dan nelayan, tidak perlu menjadi hakim, petani dan nelayan tetapi dapat diusahakan dalam bentuk yang berbeda, tetapi esensinya sama. Dan bagi agen pastoral, hal ini bisa diusahakan melalui aspek pewartaan, liturgi, pelayanan, persekutuan dan kesaksian. Misalnya, dalam berkhotbah yang berhubungan dengan bidang politik, agen pastoral dengan sikap yang tegas mesti menyuarakan kritik kepada situasi yang tidak adil yang menindas, dalam bidang ekonomi mengkritik tujuan dan kegiatan ekonomi yang hanya mempunyai dimensi dan pertimbangan ekonomi semata, tetapi tidak mempunyai tujuan-tujuan moral yaitu penyempurnaan diri manusia sebagai akhir kegiatan ekonomi. Harus tegas, berani dan tidak boleh gentar sedikit pun dalam mengkritik siapa pun yang korup dan bertindak tidak adil.

Jadi, untuk mengkritik pihak yang korup dan yang berulah sewenang-wenang, agen pastoral tidak perlu pindah pekerjaan seperti misalnya menjadi aktivis masyarakat dan LSM, tetapi semangat seperti yang ada pada seorang aktivis masyarakat dan LSM dalam mengkritik siapa pun, hendaknya menjadi sikap dan mentalitas yang mewarnai setiap aspek pewartaan, liturgi, pelayanan, persekutuan dan kesaksian agen pastoral di tengah masyarakat.

VIII. INDIKATOR KEBERPIHAKAN AGEN PASTORAL KEPADA KAUM MISKIN

Apa tandanya bahwa agen pastoral berpihak kepada kaum miskin? Seperti apakah persisnya praksis keberpihakan agen pastoral kepada kaum miskin itu dapat dipraktekkan dalam ziarah bersama kaum miskin? Dalam usaha untuk menjawab gugatan ini, saya menawarkan berbagai

kemungkinan di bawah ini. Harus diakui sebagian dari kemungkinan ini memang bukan sesuatu yang baru, lantaran mungkin sudah berulang kali dilakukan, akan tetapi baik jika perlu diingatkan lagi, sehingga tidak hanya merupakan sederetan kemungkinan-kemungkinan saja, yang bisa dilakukan dan bisa saja tidak atau malahan sama sekali memang tidak akan dilakukan.

Pertama, bidang pewartaan: menyentuh situasi dan kondisi aktual kaum miskin; menyadarkan kaum miskin untuk membangun dirinya sendiri dengan berusaha, berjuang dan bekerja keras; menyadarkan kaum miskin supaya tidak mudah dipengaruhi dan diperalat oleh berbagai motif penipuan pada perhelatan pilkada dan pemilihan anggota legislatif, sehingga dapat menggunakan hak suaranya tanpa tekanan dari siapa pun juga; mulai mengangkat tema tentang ekonomi rumah tangga yang berkeadilan, menentang ketidakadilan, korupsi, eksploitasi dan praktek ijon di tengah masyarakat yang merugikan kaum miskin; menyadarkan kaum miskin untuk peka terhadap ketidakadilan dan kekerasan; membicarakan kaum miskin dalam berbagai kesempatan seperti, seminar, sarasehan, opini di berbagai media lokal, dan pembinaan-pembinaan.

Kedua, bidang pelayanan: menjadwalkan kunjungan pastoral bagi kaum miskin secara teratur sesuai dengan kebutuhan pastoral umat setempat; mengunjungi keluarga-keluarga miskin yang membutuhkan perhatian dalam bentuk kehadiran fisik; memberikan perhatian secara intensif kepada kaum miskin yang sedang menghadapi masalah, sakit, terkena musibah, keduakaan dan lain-lain; mendahulukan kaum miskin dari umat lain dalam bentuk pelayanan karitatif; pelayanan untuk keluarga miskin menjadi fokus dan arah kebijakan pastoral.

Ketiga, bidang persekutuan: terbuka terhadap setiap masukan berupa usul saran dan harapan kaum miskin; melibatkan kaum miskin dalam menentukan arah kebijakan pastoral setempat; memberdayakan kaum miskin melalui pelatihan menenun, perbengkelan, perkoperasian, pertanian, wira usaha, dan lain-lain; menyisihkan sedikit uang kolekte dan APP sesuai kemampuan paroki untuk orang miskin; menyadarkan pihak-pihak yang tidak termasuk kategori miskin untuk saling berbagi sebagai perwujudan solidaritas kristiani dalam persekutuan; membentuk koperasi kredit demi mempermudah kaum miskin mendapatkan

pinjaman dana untuk permodalan usaha, keperluan pendidikan, pengobatan dan biaya hidup lainnya; mengadvokasi kaum miskin yang menjadi korban kekerasan dalam masyarakat; menunjukkan solidaritas kepada kaum miskin yang mengalami keduakaan, kelaparan, musibah, bencana alam dan lain sebagainya; menyemangati umat supaya rela melayani satu sama lain dalam persekutuan terutama memikirkan dan memperhatikan kaum miskin; memberikan kebijakan yang meringankan kaum miskin dalam segala urusan keuangan gerejani; biaya administrasi pengambilan surat-surat/dokumen-dokumen gerejani bagi kaum miskin disesuaikan dengan kemampuan keuangannya; membuat kebijakan yang tidak menghalangi-halangi kaum miskin untuk mendapatkan pelayanan (penerimaan sakramen-sakramen) dengan syarat yang mudah; membentuk wadah sosial paroki untuk memperjuangkan hak-hak kaum miskin; merehabilitasi kaum miskin yang menjadi korban kekerasan.

Keempat, bidang kesaksian: memberikan kesaksian hidup yang sederhana sebagai bentuk berbela rasa dengan kaum miskin; melayani kaum miskin dengan baik meskipun ketersediaan fasilitas pelayanan yang serba terbatas; menyesuaikan diri dengan kondisi kaum miskin dalam melaksanakan pelayanan; menyantuni kaum miskin dengan uang, beras, pakaian dan obat-obatan seadanya; mengusahakan dana pendidikan seadanya untuk anak-anak dari keluarga tak mampu; bekerja sama dengan pihak pemerintah maupun dengan pihak kaum miskin sendiri dalam memantau efektivitas bantuan-bantuan pemerintah untuk kaum miskin; memberikan kesaksian tentang data dan kenyataan kaum miskin di paroki kepada pemerintah; menjalin kerja sama yang baik dengan pemerintah, LSM, dan dengan pihak manapun dalam mengadvokasi kaum miskin; mengusahakan melalui kebijakan paroki untuk memberikan upah kepada mereka yang bekerja di lingkungan paroki sesuai dengan kemampuan keuangan paroki; mengusahakan melalui kebijakan paroki agar mereka yang bekerja di lingkungan paroki memiliki kontrak kerja yang jelas.

IX. KESIMPULAN

Agen pastoral dewasa ini mesti menjalankan pastoral secara profesional, dalam arti bahwa perlu dipersiapkan supaya menjalankan karya pastoral dengan penuh rasa tanggung jawab. Mempunyai wawasan

pastoral dan teologi yang mantap saja belumlah cukup, meskipun dengan mendalami ilmu pastoral dan teologi, agen pastoral menjadi sangat mahir, linca dan gesit, yang secara kuantitatif tampak dalam berbagai prestasi dan predikat akademik yang gilang gemilang dengan segala macam embel-embelnya. Ini memang penting sebagai bagian integral dari tuntutan dunia profesi yang digeluti, supaya nampak makin profesional dalam tugas, namun pengetahuan pastoral dan teologi hanya merupakan alat dan sarana bantu saja agar dapat menggambarkan konteks secara komprehensif dan integral.

Masih ada hal yang jauh lebih penting ialah agar kesibukan berpastoral dalam konteks harus terarah. Oleh karena itu, mesti merumuskan persolan dengan jelas, dalam arti bahwa soal yang mau digumuli harus mempunyai pijakan kenyataan kehidupan umat yang dilayani, jangan sepihak, sewenang-wenang apalagi berdasarkan selera. Agen pastoral perlu juga menahan diri untuk tidak jatuh dalam rutinitas pastoral dengan mengandalkan pendekatan pastoral dari atas ke bawah bukan sebaliknya. Berpastoral seperti itu hanya akan melahirkan musibah pastoral yang parah. Sudah waktunya agar agen pastoral harus berpastoral dalam konteks dengan berbasis data, sehingga dapat meracik menu pastoral yang akrab dengan konteks tersebut. Berpastoral tanpa data hanyalah sebuah imajinasi pastoral dan akan makin menegaskan bahwa agen pastoral menjauh dari konteks, ibarat seorang asing atau seorang gembala yang tidak mengenal dan tak dikenal kawanannya.

Sudah saatnya agar kesibukan agen pastoral dalam rutinitas pastoral harus peka terhadap kenyataan akan duka lara dan penderitaan sesama yang miskin, sebab kaum miskin adalah revelasi Allah sendiri. Mesti ada kerelaan untuk mendekati dan menjawab teriakan minta tolong kaum miskin dari lubang kemiskinan yang kian menganga dan mematikan itu. Maka, suatu cara berpastoral yang baik ialah harus dimulai dengan melihat dan memahami konteks tersebut secara komprehensif dan integral, lalu memberi pendasaran kemudian mencari jawaban praksis pastoral yang diharapkan. Spirit berpastoral macam inilah yang senantiasa diusung oleh kita yang menyandang gelar sebagai agen pastoral.

Inilah hal urgen yang mesti senantiasa akan digemakan dan dipraktekkan oleh agen pastoral dalam praksis pewartaan, liturgi,

pelayanan, persekutuan dan kesaksian. Bila saja agen pastoral dapat melakukan hal ini, maka akan merupakan suatu yang sangat bagus dalam mewujudkan kehidupan Gereja dan beriman yang sehat di tengah umat dan di tengah masyarakat.

Oleh karena itu, mesti mengkaji dan merumuskan kembali kebijakan pastoral paroki yang berorientasi kepada semangat memihak kepada kaum miskin dan tetap menjalin kerja sama dengan semua komponen umat, pemerintah, dan LSM sebagai mitra, sebab keberpihakan kepada kaum miskin bukan hanya menjadi amanah agen pastoral semata, melainkan menjadi amanah bagi kaum beriman Katolik pada umumnya sebagai komitmen iman dan kewajiban kemanusiaan di tengah masyarakat.